

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

L A P O R A N

# NUSANTARA



JANUARI 2022

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

LAPORAN  
NUSANTARA

JANUARI 2022

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	i
<b>PRAKATA</b>	iii
<b>BAGIAN I</b> Ringkasan Eksekutif	1
<b>BAGIAN II</b> Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Daerah	3
<b>BAGIAN III</b> Isu Strategis: <i>Mempercepat Pemulihan dan Penguatan Struktur Industri Manufaktur</i>	13



---

# Prakata

**B**erbagai aspek dalam perekonomian, termasuk dari perspektif kewilayahan, menjadi pertimbangan penting di dalam proses perumusan kebijakan di Bank Indonesia. Publikasi Laporan Nusantara ini merupakan pandangan Bank Indonesia terhadap dinamika perekonomian dalam perspektif spasial yang disarikan dari hasil pembahasan yang komprehensif antara Dewan Gubernur dengan seluruh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah. Asesmen perekonomian spasial dalam publikasi ini didasarkan pada perkembangan perekonomian di lima wilayah, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua).

Laporan Nusantara dipublikasikan secara triwulanan oleh Bank Indonesia pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dinamika terkini dan prospek perekonomian daerah. Publikasi Laporan Nusantara edisi kali ini juga mengangkat isu strategis mengenai “Mempercepat Pemulihan dan Penguatan Struktur Industri Manufaktur”. Upaya pemulihan ekonomi yang terus berjalan perlu tetap disertai penguatan strategi untuk mendorong transformasi Indonesia menuju negara maju. Namun, kondisi struktur industri manufaktur hingga kini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti ekspor yang didominasi oleh produk berbasis sumber daya alam dan produk dengan tingkat pengolahan yang relatif rendah, serta ketergantungan terhadap bahan baku impor yang tinggi. Demikian pula dengan *linkage* antarindustri dan antarwilayah yang belum cukup kuat, di tengah tantangan terkait transisi menuju ekonomi hijau yang semakin mengemuka. Terkait dengan tantangan tersebut, berbagai upaya untuk memperkuat struktur industri manufaktur perlu segera diakselerasi.

Sebagai penutup, kami berharap buku Laporan Nusantara ini dapat memberi manfaat dan masukan bagi para pemangku kepentingan dan pemerhati ekonomi daerah, sebagai salah satu kontribusi Bank Indonesia dalam pembangunan ekonomi daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati langkah kita bersama untuk berkarya demi nusa dan bangsa, membangun untuk Indonesia Maju.

**Jakarta, 27 Januari 2022**

*Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter*

**Solikin M. Juhro**  
Direktur Eksekutif

---

*"Halaman ini sengaja dikosongkan"*

# BAGIAN 1

## Ringkasan Eksekutif

**Perbaikan ekonomi di berbagai daerah diprakirakan terus berlanjut pada triwulan IV 2021.** Hal ini ditopang peningkatan mobilitas masyarakat di seluruh wilayah seiring dengan penurunan kasus Covid-19 dan pelanggaran restriksi mobilitas, disertai berlanjutnya akselerasi vaksinasi serta belanja pemerintah daerah yang meningkat di akhir tahun. Di samping itu, permintaan eksternal yang masih kuat dapat menopang kinerja ekspor nonmigas, baik manufaktur maupun yang berbasis sumber daya alam. Perkembangan positif tersebut mendorong kinerja hampir seluruh lapangan usaha (LU), seperti perdagangan di seluruh wilayah, industri manufaktur di Jawa, serta pertambangan di Kalimantan dan Sulampua. Perbaikan permintaan turut mendorong berlanjutnya investasi, termasuk terkait relokasi korporasi di sejumlah daerah di Jawa dan proyek hilirisasi di Sulampua. Meski demikian, tertundanya penyelesaian sejumlah proyek pemerintah di daerah antara lain karena *refocusing* anggaran menahan peningkatan kinerja investasi lebih lanjut.

**Membaiknya permintaan domestik dan tetap kuatnya permintaan eksternal mendorong perbaikan kinerja LU utama daerah.** Perbaikan permintaan domestik, yang didukung peningkatan mobilitas seiring dengan penurunan kasus Covid-19 dan pelanggaran PPKM Level mendorong LU Perdagangan dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) tumbuh lebih tinggi di seluruh wilayah. Pelonggaran PPKM sejak akhir triwulan III 2021 turut mendorong peningkatan aktivitas produksi sektor-sektor esensial di tengah permintaan domestik dan eksternal yang kuat sehingga mendukung perbaikan kinerja LU Industri Pengolahan. Sementara itu, permintaan eksternal yang tetap kuat untuk berbagai komoditas tambang utama, terutama batu bara di Sumatera dan Kalimantan, didukung dengan kemampuan produksi yang terjaga menopang kinerja LU Pertambangan. Kinerja LU Pertanian juga diprakirakan tumbuh lebih baik dari perkiraan sebelumnya ditopang hasil panen tanaman bahan makanan (tabama) yang lebih baik di berbagai daerah sentra. Hal ini didukung minimalnya daerah terdampak banjir di tengah La Nina yang menguat. Sejalan dengan kinerja investasi, perbaikan LU Konstruksi masih berlanjut ditopang berlanjutnya pembangunan infrastruktur pemerintah dan proyek konstruksi swasta di berbagai daerah, meski lebih terbatas akibat mundurnya penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur di daerah.

**Dengan kondisi tersebut, perbaikan kinerja ekonomi di**

**seluruh wilayah untuk keseluruhan 2021 masih sejalan dengan perkiraan sebelumnya.** Perkembangan indikator ekonomi hingga akhir 2021 mengindikasikan akselerasi proses pemulihan, antara lain mobilitas masyarakat, penjualan eceran, dan keyakinan konsumen seiring dengan penurunan kasus Covid-19 dan pelanggaran restriksi mobilitas. Akselerasi vaksinasi serta dukungan stimulus dan belanja fiskal daerah turut mendorong perbaikan permintaan domestik sehingga menopang kinerja LU *non-tradable* dan berorientasi domestik dapat tumbuh lebih tinggi. Selain itu permintaan eksternal yang masih kuat juga diprakirakan mendorong kinerja LU *tradable* dan berorientasi ekspor. Perkembangan positif di berbagai wilayah tersebut mendukung prospek pertumbuhan ekonomi nasional pada 2021 yang berada dalam kisaran 3,2-4,0%. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi diprakirakan meningkat ke kisaran 4,7-5,5% pada 2022, sejalan dengan akselerasi konsumsi swasta dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal dan ekspor, meski risiko kenaikan kasus Covid-19 tetap perlu terus diwaspadai. Prakiraan tersebut didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut.

**Ke depan, ditengah upaya pemulihan ekonomi yang terus berjalan perlu tetap disertai penguatan strategi untuk mendorong transformasi Indonesia menuju negara maju.** Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, struktur neraca transaksi berjalan yang kuat dan sehat perlu terus didorong, salah satunya melalui penguatan industri manufaktur berorientasi ekspor yang bernilai tambah tinggi, di tengah proses pemulihan industri manufaktur yang terus berlangsung. Saat ini kinerja industri manufaktur terus melanjutkan pemulihan, utamanya didorong oleh ekspor produk industri manufaktur yang berdaya saing dan permintaan domestik yang membaik secara bertahap. Namun, kondisi struktur industri manufaktur hingga kini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti ekspor yang secara umum masih didominasi oleh produk berbasis sumber daya alam dan produk dengan tingkat pengolahan yang relatif rendah. Selain itu, ketergantungan terhadap bahan baku impor masih tinggi. Demikian pula dengan *linkage* antarindustri dan antarwilayah yang belum cukup kuat, di tengah tantangan terkait transisi menuju ekonomi hijau yang semakin mengemuka. Terkait dengan tantangan tersebut, berbagai upaya untuk memperkuat struktur industri manufaktur, termasuk mendorong berkembangnya *linkage* industri dan transisi menuju industri hijau, akan

dibahas lebih lanjut pada Bagian III Isu Strategis: “Mempercepat Pemulihan dan Penguatan Struktur Industri Manufaktur”.

**Di sisi inflasi, realisasi inflasi di seluruh wilayah hingga akhir 2021 tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian.** Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) secara nasional pada 2021 tercatat 1,87% (yoy) dan berada di bawah kisaran sasaran  $3,0\% \pm 1\%$ , meski meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK 2020 yang sebesar 1,68% (yoy). Rendahnya tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh inflasi inti yang tetap rendah dan inflasi VF yang relatif terjaga, di tengah meningkatnya inflasi AP di seluruh wilayah. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak

pandemi Covid-19, nilai tukar yang stabil dan ekspektasi inflasi yang terjaga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan, serta sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Pada 2022, inflasi diperkirakan terkendali dalam kisaran sasaran  $3,0\% \pm 1\%$  sejalan dengan masih memadainya penawaran agregat dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat, tetap terkendalinya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta respons kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah. Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) guna menjaga inflasi IHK dalam kisaran targetnya.

## BAGIAN 2

# Perkembangan Terkini dan Prospek Ekonomi Daerah

### Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Perbaikan ekonomi di berbagai daerah diperkirakan terus berlanjut pada triwulan IV 2021. Peningkatan mobilitas masyarakat dan belanja pemerintah daerah serta ekspor nonmigas yang tetap kuat pada akhir tahun menopang perbaikan kinerja perekonomian di berbagai daerah. Perkembangan tersebut mendorong kinerja hampir seluruh lapangan usaha (LU), seperti perdagangan di seluruh wilayah, industri manufaktur di Jawa, serta pertambangan di Kalimantan dan Sulampua.

Perbaikan kinerja ekonomi di seluruh wilayah untuk keseluruhan 2021 masih sejalan dengan perkiraan sebelumnya. Permintaan domestik membaik didukung penurunan kasus Covid-19, pelonggaran restriksi mobilitas, akselerasi vaksinasi serta dukungan stimulus dan belanja fiskal daerah, secara keseluruhan menopang perbaikan kinerja LU *non-tradable*. Permintaan eksternal yang masih kuat juga turut mendorong kinerja LU *tradable*. Perkembangan positif di berbagai wilayah tersebut mendukung prospek pertumbuhan ekonomi nasional pada 2021 yang berada dalam kisaran 3,2-4,0%. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat ke kisaran 4,7-5,5% pada 2022, sejalan dengan akselerasi konsumsi swasta dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal dan ekspor, meski risiko kenaikan kasus Covid-19 tetap perlu terus diwaspadai. Prakiraan tersebut didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut.

### Kinerja Permintaan

#### *Ekspor Luar Negeri*

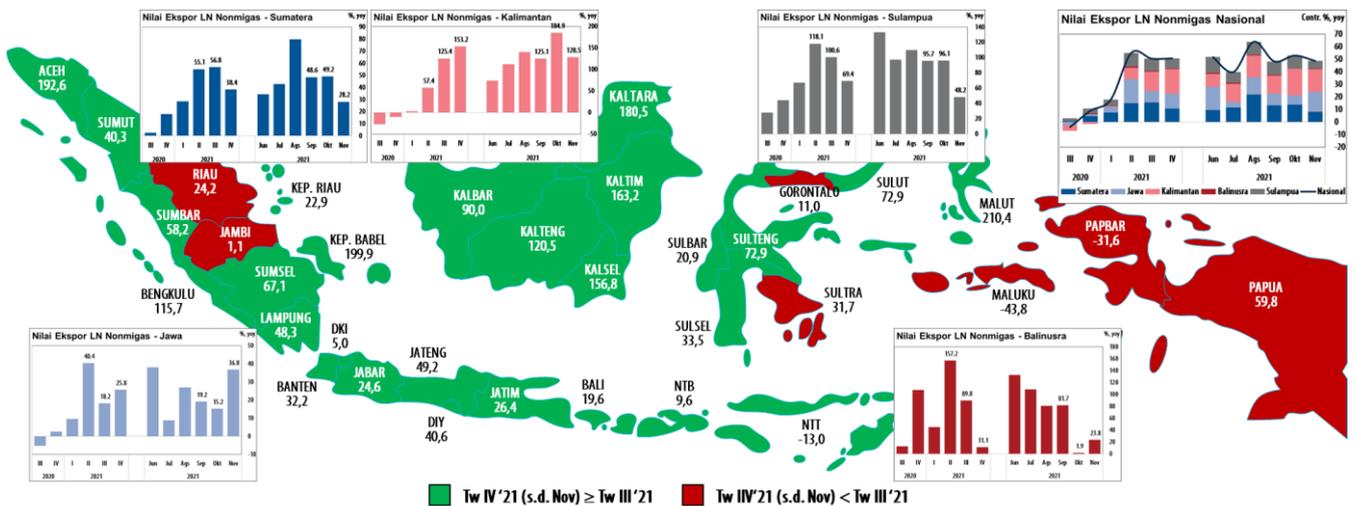
**Ekspor nonmigas di berbagai daerah pada triwulan IV 2021 diperkirakan tumbuh membaik meski tidak setinggi proyeksi sebelumnya (Gambar II.1).**

Membaiknya kinerja ekspor Jawa seiring perbaikan aktivitas produksi yang didukung pelonggaran restriksi PPKM dan pembukaan sektor-sektor prioritas yang semakin luas sejak akhir triwulan III 2021. Kondisi tersebut mendorong kinerja ekspor manufaktur dari Jawa di tengah permintaan eksternal yang masih tetap kuat. Namun, dampak dari tingginya tarif kontainer menjadi risiko yang menahan peningkatan kinerja ekspor manufaktur dari Jawa lebih

lanjut. Di Kalimantan, kinerja ekspor diperkirakan meningkat tinggi didorong batu bara terutama untuk tujuan Tiongkok yang disertai peningkatan harga. Kendati demikian, peningkatan lebih lanjut tertahan oleh kinerja ekspor CPO yang melambat. Di Sumatera, perbaikan kinerja ekspor diperkirakan tertahan akibat menurunnya ekspor CPO, antara lain terkait kendala pasokan bahan baku tandan buah segar sawit. Kinerja ekspor wilayah ini ditopang oleh perbaikan ekspor batu bara serta *pulp & waste paper*. Kinerja ekspor Sulampua juga tetap kuat meski sedikit tertahan karena moderasi permintaan Tiongkok akibat kendala produksi terkait krisis energi yang terjadi di negara tersebut. Sementara ekspor konsentrat tembaga dari wilayah ini melambat karena pengaruh *base effect* tingginya ekspor triwulan IV 2020 yang didorong produksi tambang bawah tanah Papua. Kinerja ekspor Balinusra tetap tumbuh positif meski melambat akibat penurunan *recovery rate* konsentrat tembaga di tambang utama. Dengan perkembangan tersebut, perkembangan ekspor nonmigas untuk keseluruhan tahun 2021 akan tumbuh meningkat meski sedikit lebih rendah dari prakiraan sebelumnya.

**Prospek kinerja ekspor berbagai komoditas utama daerah pada 2022 diperkirakan tetap tumbuh kuat seiring berlanjutnya pemulihan ekonomi global.**

Volume perdagangan dan harga komoditas dunia diperkirakan masih meningkat, sehingga menopang prospek ekspor berbagai daerah termasuk untuk komoditas batu bara dan CPO. Prospek positif ini ditopang sisi produksi batu bara di Kalimantan dan Sulampua yang diperkirakan tumbuh meningkat pada 2022. Demikian halnya dengan produksi CPO yang diperkirakan meningkat dengan meredanya dampak tunda kekeringan 2019 yang mengganggu produksi pada 2021, disertai produktivitas yang lebih baik dan cuaca yang lebih kondusif. Di Jawa, ekspor berbagai produk manufaktur diperkirakan tetap tumbuh positif, disertai peningkatan kapasitas produksi yang telah berlangsung sejak 2021. Ekspor besi baja dan tembaga dari Sulampua juga diperkirakan tetap tumbuh tinggi ditengah peningkatan kapasitas produksi yang relatif lebih terbatas dibandingkan 2021. Sementara, ekspor konsentrat tembaga dari Balinusra diperkirakan tumbuh lebih tinggi didukung peningkatan kapasitas penambangan untuk mengompensasi turunnya kandungan logam yang terjadi hingga triwulan I 2022.

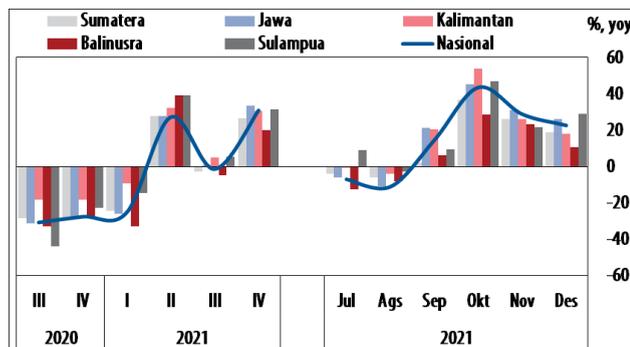


Sumber: Bea Cukai, diolah (data triwulan IV 2021 s.d. November 2021)

**Gambar II.1.** Peta Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Daerah Triwulan IV 2021 (%yoy)

### Konsumsi Swasta

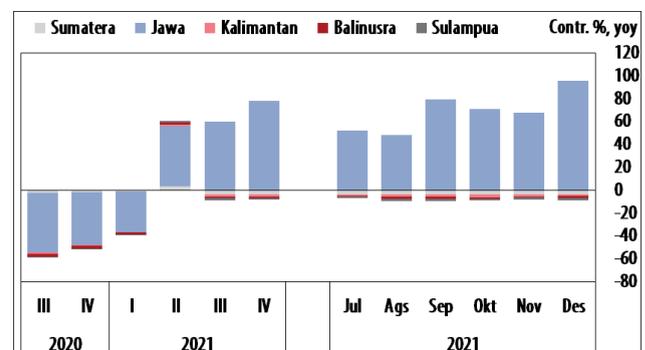
Perbaikan konsumsi swasta diperkirakan terus berlanjut di seluruh wilayah pada triwulan IV 2021, dan lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya. Perkembangan ini terutama didukung peningkatan mobilitas masyarakat di seluruh wilayah seiring dengan penurunan kasus Covid-19 dan pelonggaran restriksi mobilitas, disertai berlanjutnya akselerasi vaksinasi. Di samping itu, pembatalan rencana pengetatan mobilitas pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) juga turut mendukung berlanjutnya perbaikan aktivitas konsumsi masyarakat. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator konsumsi di berbagai daerah yang terus membaik, seperti penjualan eceran, keyakinan masyarakat, dan ketersediaan lapangan kerja (Grafik II.1 dan Grafik II.2). Perkembangan positif ini juga didukung oleh berlanjutnya program bantuan sosial serta sejumlah insentif untuk mendorong peningkatan konsumsi, seperti insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor dan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk properti. Kondisi yang terus membaik tersebut mendukung konsumsi swasta sehingga secara keseluruhan 2021 diperkirakan tumbuh lebih baik dari prakiraan sebelumnya.



Sumber: Bank Indonesia

**Grafik II.1.** Indeks Keyakinan Konsumen

Kinerja konsumsi swasta diperkirakan terus meningkat pada 2022. Prakiraan ini didukung peningkatan mobilitas disertai berlanjutnya akselerasi vaksinasi, termasuk pelaksanaan vaksinasi *booster*, diseluruh wilayah. Selain itu kebijakan pembukaan sektor-sektor prioritas yang lebih luas, termasuk di bidang pendidikan melalui pembelajaran tatap muka, dengan penerapan disiplin protokol kesehatan turut mendorong peningkatan mobilitas lebih lanjut. Sejalan dengan itu, perkembangan ketenagakerjaan yang terus membaik akan berkontribusi positif pada berlanjutnya perbaikan konsumsi swasta. Perkembangan positif konsumsi swasta juga akan didukung berlanjutnya program bantuan sosial serta perpanjangan insentif fiskal untuk mendorong perbaikan konsumsi. Namun, risiko kenaikan kasus Covid-19 dengan terindikasinya varian baru pada awal 2022 dapat berisiko menahan perbaikan konsumsi swasta lebih lanjut. Untuk itu, akselerasi vaksinasi yang didukung oleh disiplin protokol kesehatan yang ketat menjadi unsur penting dalam menahan penyebaran Covid-19 dan mendorong konsumsi swasta.



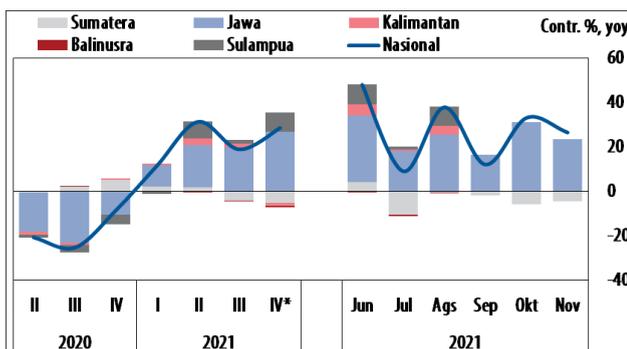
Sumber: Bank Indonesia

**Grafik II.2.** Indikator Ketersediaan Lapangan Kerja

### Investasi

Kinerja investasi pada triwulan IV 2021 di berbagai wilayah diperkirakan terus membaik, meski tidak sekuat

**prakiraan sebelumnya.** Perbaikan investasi nonbangunan terindikasi dari impor barang modal yang meningkat terutama di Jawa dan Sulampua (Grafik II.3). Investasi nonbangunan di Jawa terutama ditopang perdagangan alat berat, kendaraan bermotor dan komputer, serta industri kendaraan bermotor dan elektronik, termasuk berlanjutnya realisasi investasi terkait relokasi korporasi. Sementara investasi nonbangunan di Sulampua didorong oleh berlanjutnya investasi hilirisasi industri baja, baik untuk korporasi baru maupun lama. Di Kalimantan, investasi nonbangunan didukung industri pengolahan dan pertambangan sejalan dengan tetap kuatnya ekspor. Di Sumatera, investasi nonbangunan ditopang industri terkait elektronik, kertas, dan transportasi. Kondisi serupa juga terjadi pada investasi bangunan yang membaik sejalan dengan berlanjutnya penyelesaian proyek infrastruktur pemerintah dan properti swasta, serta berlanjutnya pembangunan konstruksi sejumlah smelter. Secara keseluruhan 2021, kinerja investasi diprakirakan membaik di seluruh wilayah meski tidak sekuat prakiraan sebelumnya akibat tertundanya penyelesaian sejumlah proyek pemerintah, termasuk proyek strategis nasional, di sejumlah daerah terkait *refocusing* anggaran.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

\* s.d. November 2021

Grafik II.3. Impor Barang Modal

**Perbaikan kinerja investasi diprakirakan terus berlanjut pada 2022, didukung berlanjutnya proyek pemerintah dan swasta.** Peningkatan kinerja investasi terutama didorong bertambahnya jumlah korporasi global yang melakukan relokasi produksinya ke beberapa daerah di Indonesia, meningkatnya target penyelesaian proyek strategis nasional, dan akselerasi penyelesaian sejumlah proyek swasta. Di Jawa, prospek investasi swasta didukung berlanjutnya proyek pabrik petrokimia, peningkatan kapasitas di industri tekstil dan produk tekstil, alas kaki, ekosistem *electric vehicle*, *data center*, serta pabrik dan smelter di Kawasan Industri Batang dan KEK JIPE. Kondisi tersebut juga didukung penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur daerah. Perkembangan serupa juga diperkirakan mendukung prospek investasi Sumatera, yang bersumber dari sejumlah proyek investasi seperti gasifikasi

batubara dan PLTU mulut tambang, serta akselerasi penyelesaian proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Perbaikan investasi di Kalimantan didukung oleh realisasi proyek investasi swasta diantaranya penyelesaian pertambangan migas di Kaltim dan industri alumina di Kalbar, serta pembangunan infrastruktur seperti bendungan, kelistrikan dan kawasan industri. Sementara itu, prospek peningkatan investasi di Sulampua didukung berlanjutnya pembangunan smelter di Sulawesi dan Maluku, pengembangan tambang tembaga bawah tanah di Papua, serta berbagai proyek infrastruktur seperti bendungan, bandara, pelabuhan, dan kelistrikan di beberapa daerah di Sulampua. Di Balinusra, prospek kinerja investasi didukung oleh pembangunan smelter di NTB, serta pembangunan infrastruktur KEK Kesehatan di Bali, dan jalan di NTT. Masih kuatnya prospek investasi ke depan akan terus didukung berlanjutnya upaya peningkatan iklim investasi, termasuk dengan mengoptimalkan implementasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dan percepatan penyelesaian regulasi pendukungnya di daerah.

### Konsumsi Pemerintah – Fiskal Daerah

**Stimulus belanja belanja Pemerintah Pusat kuat pada triwulan IV 2021 disertai realisasi belanja Pemerintah Daerah yang mulai terakselerasi.** Realisasi belanja Pemerintah Pusat yang meningkat terutama didorong oleh komponen belanja barang dan modal dalam rangka penanganan pandemi di bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi, serta realisasi belanja untuk proyek infrastruktur. Pada saat yang sama, realisasi belanja Pemerintah Daerah juga mulai meningkat sebagaimana pola historisnya, terutama pada komponen belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa. Peningkatan realisasi belanja daerah ini didukung oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tercatat positif pada akhir tahun 2021, terutama pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik (Tabel II.1).

Tabel II.1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

TKDD (Triliun Rp)	Perpres 72/2020	APBN 2021	PMK 17/2021	Realisasi		
				% thp pagu s.d. Des 2020	% thp pagu s.d. Des 2021	Des 2021 (yoy)
Transfer ke Daerah	692.7	723.5	708.5	99.8%	100.8%	3.2%
I. Dana Perimbangan	653.4	688.7	674.2	99.8%	100.8%	4.2%
A. Dana Transfer Umum	470.8	492.3	479.8	101.0%	103.2%	4.1%
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	86.4	102.0	102.0	108.7%	114.9%	24.8%
2. Dana Alokasi Umum	384.4	390.3	377.8	99.3%	100.0%	-1.0%
B. Dana Transfer Khusus	182.6	196.4	194.4	96.7%	95.0%	4.6%
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	53.9	65.2	63.6	93.1%	89.7%	13.7%
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	128.8	131.2	130.8	98.1%	97.5%	0.9%
II. Dana Insentif Daerah	18.5	13.5	13.5	99.8%	99.7%	-27.0%
III. Dana Otsus dan Keistimewaan	20.9	21.3	20.8	99.9%	100.0%	-0.4%
Dana Desa	71.2	72.0	72.0	99.9%	99.8%	1.1%
TKDD	763.9	795.5	780.5	99.8%	100.7%	3.0%

Sumber: Kemenkeu, diolah

**Peran belanja Pemerintah Daerah pada 2022 akan terus dioptimalkan untuk mendukung akselerasi pemulihan ekonomi.** Ditengah pagu alokasi TKDD 2022 yang sedikit

mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, upaya daerah dalam mengoptimalkan peran belanja untuk mendukung akselerasi pemulihan terus dilakukan termasuk melalui percepatan realisasi belanja. Realisasi belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung upaya peningkatan SDM di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daerah, disertai upaya penanganan kemiskinan ekstrem. Selain itu, dengan disahkannya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) pada akhir 2021, maka daerah perlu mempersiapkan dengan baik proses transisi yang diperlukan pada 2022. Ke depan, implementasi dari UU ini akan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama terkait dengan efisiensi perpajakan dan retribusi, peningkatan kualitas belanja, serta upaya mengurangi ketimpangan antardaerah melalui kebijakan transfer yang berbasis kinerja. Beberapa hal yang diatur melalui UU ini yaitu skema Opsen pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta penetapan anggaran belanja pegawai dan belanja infrastruktur, masing-masing maksimal sebesar 30% dan minimal sebesar 40% dari pagu belanja daerah dalam APBD.

## Kinerja Lapangan Usaha

### *Pertanian*

**Kinerja LU Pertanian di berbagai daerah pada triwulan IV 2021 lebih baik dari prakiraan sebelumnya.** Produksi padi menopang kinerja LU Pertanian lebih baik dari prakiraan karena membaiknya hasil panen di daerah sentra produksi di Jawa, Sumatera, dan Balinusra. Namun, produksi hortikultura dan perikanan yang melambat menahan perbaikan kinerja LU Pertanian lebih lanjut. Masuknya masa tanam hortikultura di berbagai daerah sentra disertai tingginya curah hujan menjelang akhir tahun memengaruhi capaian produksi hortikultura pada triwulan IV 2021. Faktor cuaca yang menyebabkan tingginya gelombang laut di sejumlah wilayah juga turut mengganggu aktivitas produksi perikanan, terutama di Sulampua. Di sisi lain, perbaikan produksi tandan buah segar sawit (TBS) pada triwulan IV 2021 masih tertahan karena lebih panjangnya pengaruh dampak tunda kekeringan yang terjadi pada 2019, khususnya di Sumatera dan Kalimantan. Dengan berbagai perkembangan tersebut, maka secara keseluruhan tahun 2021 LU Pertanian tetap tumbuh positif di seluruh wilayah sejalan dengan prakiraan sebelumnya.

**Prospek LU Pertanian pada 2022 diprakirakan terus membaik, terutama didorong kinerja TBS kelapa sawit.** Selain didukung meredanya dampak tunda kekeringan 2019, peningkatan kinerja produksi TBS dipengaruhi membaiknya lahan produktif hasil *replanting*. Selain itu, peningkatan permintaan industri CPO dan turunannya, baik

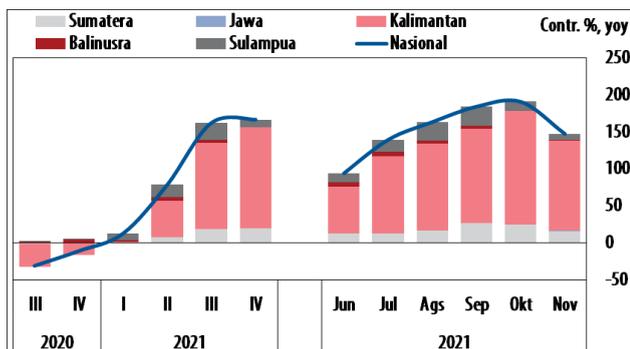
dari domestik maupun eksternal menjadi insentif untuk peningkatan produksi sawit. Perbaikan kinerja LU Pertanian pada 2022 juga diperkirakan didukung peningkatan produksi tabama seiring dengan upaya intensifikasi yang ditempuh di berbagai daerah, termasuk dukungan dari *food estate*. Produksi tabama diperkirakan meningkat cukup tinggi pada masa panen raya triwulan I 2022 didukung minimalnya risiko banjir di daerah sentra. Demikian halnya dengan kinerja produksi hortikultura dan perikanan yang diperkirakan tetap positif pada 2022. Namun, indikasi La Nina yang masih terjadi hingga akhir paruh pertama 2022, peningkatan biaya produksi terutama pupuk, serta penyesuaian terhadap implementasi kebijakan pembatasan penangkapan ikan menjadi risiko yang dapat memengaruhi kinerja LU Pertanian.

### *Pertambangan*

**Pada triwulan IV 2021, kinerja LU Pertambangan diprakirakan tumbuh melambat meski lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya.** Perlambatan terutama dipengaruhi oleh peningkatan kapasitas produksi tambang tembaga yang lebih rendah dari prakiraan. Namun, permintaan eksternal untuk berbagai komoditas tambang utama tetap tinggi sampai dengan akhir 2021 (Grafik II.4). Kondisi tersebut juga didukung aktivitas produksi yang tetap terjaga disertai berlanjutnya investasi korporasi pertambangan hingga akhir 2021, baik berupa perluasan kapasitas maupun peralatan produksi. Di Sulampua, kinerja LU Pertambangan ditopang produksi nikel untuk mendukung industri besi baja seiring masih kuatnya permintaan ekspor, meski di sisi lain peningkatan kapasitas produksi konsentrat tembaga cenderung lebih terbatas pada akhir 2021. Kinerja pertambangan tembaga di Balinusra juga diprakirakan masih terbatas akibat menurunnya kandungan logam. Sementara di Sumatera dan Kalimantan, produksi batu bara diperkirakan tetap kuat, baik untuk memenuhi permintaan eksternal maupun domestik, didukung cuaca yang masih kondusif dan meredanya kendala ketersediaan alat berat. Produksi pertambangan timah di Sumatera juga terindikasi lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya seiring meningkatnya kebutuhan industri bahan baku elektronik berorientasi ekspor. Selain itu, produksi bauksit di Kalimantan juga tetap kuat untuk memasok kebutuhan smelter alumina. Berbagai perkembangan tersebut mendorong kinerja LU Pertambangan nasional meningkat signifikan dibandingkan 2020 dan tumbuh lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya.

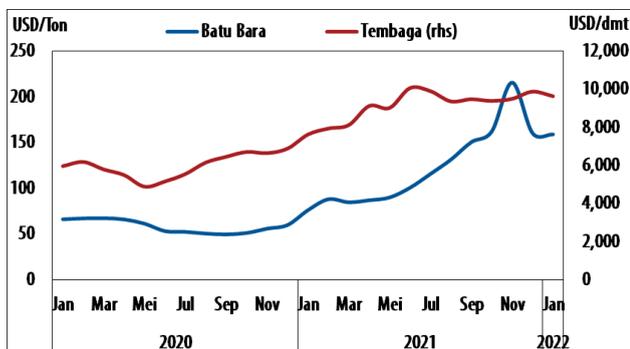
**Prospek kinerja pertambangan pada 2022 diprakirakan tetap positif, meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya.** Prospek tersebut didukung perkembangan harga komoditas utama pertambangan nasional yang diprakirakan masih cukup tinggi (Grafik II.5). Produksi batu

bara di Kalimantan dan Sumatera diperkirakan tetap tumbuh positif meski melambat seiring penambahan kuota produksi yang tidak sebesar tahun sebelumnya. Namun, peningkatan permintaan domestik dan eksternal diperkirakan mendorong produksi batu bara tetap tumbuh tinggi pada 2022. Di Sulampua, produksi konsentrat tembaga diperkirakan melambat seiring peningkatan kapasitas yang tidak sebesar tahun sebelumnya. Selain itu, permintaan besi baja Tiongkok juga diperkirakan termoderasi, sehingga menahan peningkatan kinerja pertambangan nikel lebih lanjut. Di sisi lain, kinerja pertambangan konsentrat tembaga Balinusra diperkirakan membaik didukung peningkatan kapasitas penambangan yang akan berlanjut pada triwulan I 2022.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik II.4. Nilai Ekspor Pertambangan



Sumber: Kementerian ESDM, diolah

Grafik II.5. Harga Acuan Batu Bara dan Tembaga

**Ke depan, pengembangan hilirisasi mineral dapat diarahkan untuk turut mendukung transisi menuju energi hijau.** Hal ini sejalan dengan prospek permintaan global terhadap berbagai jenis mineral logam yang diperkirakan semakin pesat meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan teknologi energi hijau<sup>1</sup>. Di samping itu, permintaan terhadap berbagai jenis teknologi tersebut juga sejalan dengan upaya mencapai komitmen *Paris Agreement*. Mengantisipasi perkembangan ini, maka Indonesia yang memiliki potensi cadangan nikel, tembaga, dan bauksit dalam jumlah besar, perlu memanfaatkan peluang yang ada melalui upaya hilirisasi, sekaligus untuk

mendukung transisi energi nasional (Tabel II.2). Saat ini, upaya hilirisasi telah berjalan dengan cukup positif pada komoditas nikel dan bahkan mulai mengarah sebagai bahan baku baterai mobil listrik. Upaya hilirisasi nikel ini telah memberikan dampak yang positif bagi kinerja ekonomi, terutama di wilayah Sulampua. Berkaca pada hal tersebut, maka upaya hilirisasi untuk tembaga dan bauksit, yang saat ini masih terbatas pada proses pemurnian dengan peningkatan nilai tambah yang rendah, juga perlu terus diakselerasi. Pada saat yang sama, strategi pengembangan hilirisasi juga disertai upaya mendorong berkembangnya industri teknologi hijau yang berbasis tembaga dan bauksit.

Tabel II.2. Penggunaan Mineral Tambang Untuk Teknologi Energi Hijau

Technology	Minerals								
	Copper	Cobalt	Nickel	Lithium	Rare Earth	Chromium	Zinc	PGMs	Aluminium
Solar PV	●	○	○	○	○	○	○	○	●
Wind	●	○	○	○	○	○	○	○	●
Hydro	●	○	○	○	○	○	○	○	●
CSP	●	○	○	○	○	○	○	○	●
Bio Energy	●	○	○	○	○	○	○	○	●
Geothermal	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nuclear	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Electricity Networks	●	○	○	○	○	○	○	○	●
EVs & Battery Storage	●	●	●	●	○	○	○	○	●
Hydrogen	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cadangan Indonesia (% terhadap global)	3%		30%						4%*

Keterangan: warna menunjukkan pentingnya mineral dalam teknologi terkait; ●: tinggi; ●: sedang; ○: rendah.

\*Cadangan bauksit (bahan baku aluminium)

Sumber: International Energy Agency, 2021; United States Geological Survey.

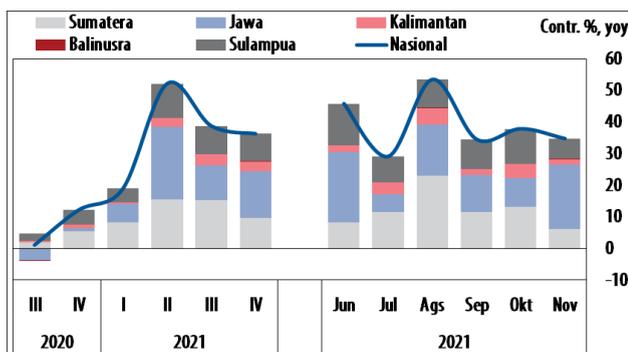
## Industri Pengolahan

**Kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan IV 2021 membaik dan lebih tinggi dibandingkan prakiraan sebelumnya.** Perkembangan positif ini didukung pelonggaran PPKM sejak akhir triwulan III 2021 yang mendorong peningkatan aktivitas produksi pada sektor-sektor esensial. Hal ini juga disertai membaiknya permintaan domestik sehingga menopang kinerja Industri Pengolahan yang berorientasi domestik, termasuk industri makanan serta industri otomotif. Selain itu, permintaan eksternal yang tetap kuat turut mendukung terjaganya kinerja ekspor manufaktur di berbagai daerah (Grafik II.6).

Di Sumatera, kinerja LU Industri Pengolahan ditopang industri berbasis kelapa sawit, meski sedikit terhambat oleh ketersediaan bahan baku. Perkembangan ini disertai meningkatnya permintaan bahan bakar dan produksi industri FAME seiring membaiknya mobilitas di seluruh wilayah. Selain itu, kinerja LU Industri Pengolahan wilayah ini didukung permintaan ekspor yang masih cukup kuat untuk produk manufaktur utama Sumatera seperti CPO, industri berbasis timah, serta industri elektronik. Perkembangan industri berbasis kelapa sawit juga turut mendukung kinerja LU Industri Pengolahan di Kalimantan, termasuk dukungan

<sup>1</sup> International Energy Agency (2021)

dari industri alumina seiring kenaikan permintaan ekspor untuk memenuhi kebutuhan pengembangan teknologi industri baru terbarukan. Di Jawa, perbaikan aktivitas industri dan permintaan domestik, disertai dukungan insentif fiskal, dan permintaan ekspor yang tetap kuat berdampak pada kenaikan kinerja LU Industri Pengolahan wilayah ini. Permintaan otomotif meningkat tajam dengan didukung kebijakan insentif hingga akhir 2021 sehingga mendorong produksi otomotif tumbuh hingga 58,3% (yoy)<sup>2</sup> pada akhir 2021. Sementara itu, permintaan ekspor terutama dari AS yang tetap tinggi, dibarengi adanya kendala produksi di berbagai negara kompetitor turut mendorong kinerja ekspor industri TPT dan alas kaki dari Jawa. Di Sulampua, perbaikan kinerja LU Industri Pengolahan didukung industri makanan dan minuman berorientasi domestik dan industri besi baja seiring masih kuatnya permintaan ekspor dari Tiongkok. Perkembangan positif di berbagai wilayah tersebut mendorong kinerja LU Industri Pengolahan secara keseluruhan 2021 tumbuh lebih baik dari prakiraan sebelumnya.

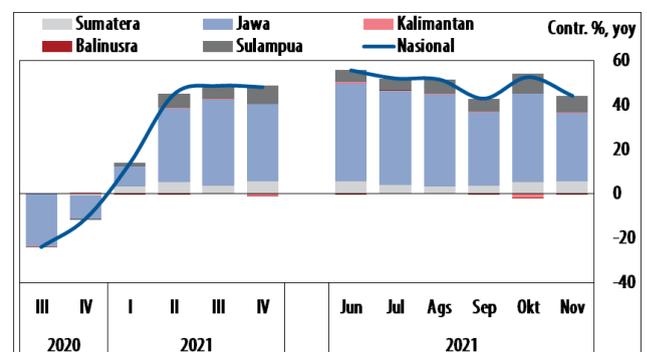


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik II.6. Ekspor Industri Pengolahan

**Kinerja LU Industri Pengolahan di berbagai wilayah pada 2022 diprakirakan terakselerasi, didorong peningkatan permintaan domestik serta permintaan eksternal yang tetap kuat.** Prospek produksi yang masih tetap kuat di berbagai daerah tercermin dari impor bahan baku yang masih tumbuh tinggi hingga akhir 2021 (Grafik II.7). Di Sumatera dan Kalimantan, industri berbasis kelapa sawit diprakirakan mendorong peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan, baik dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Prospek tersebut didukung meningkatnya kapasitas produksi, serta prospek produksi sawit sebagai bahan baku utama yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, perkembangan hilirisasi berbagai komoditas pertambangan mineral seperti smelter timah di Sumatera, smelter alumina dan timbal di Kalimantan, juga akan mendorong perbaikan kinerja LU Industri Pengolahan di kedua wilayah ini lebih lanjut. Di Jawa, prospek peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan

didukung industri otomotif untuk memenuhi kuatnya permintaan domestik yang didukung berlanjutnya kebijakan insentif PPnBM untuk pembelian mobil baru. Lebih lanjut, produksi kendaraan listrik juga akan mendukung tetap terjaganya ekspor ke depan. Kinerja industri TPT dan alas kaki juga diprakirakan tetap terjaga seiring permintaan global yang tetap kuat, didukung oleh investasi penambahan kapasitas produksi berbagai korporasi sejak akhir 2021. Sementara di Sulampua, industri makanan dan minuman diprakirakan menopang perbaikan kinerja LU Industri Pengolahan, terutama untuk memenuhi permintaan domestik. Industri hilirisasi nikel juga akan tetap menopang kinerja ekspor didukung berlanjutnya peningkatan kapasitas produksi di berbagai daerah, terutama di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, meskipun lebih terbatas dibandingkan peningkatan kapasitas pada tahun-tahun sebelumnya.



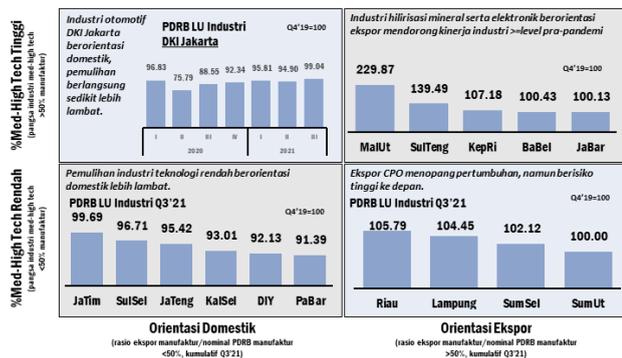
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik II.7. Impor Bahan Baku

**Prospek positif kinerja LU Industri Pengolahan ke depan akan terus didukung berbagai kebijakan untuk mengakselerasi pemulihan disertai penguatan struktur industri nasional.** Dukungan kebijakan Pemerintah untuk menjaga keberlangsungan aktivitas produksi selama pandemi berperan penting dalam perbaikan kinerja tersebut. Namun, kecepatan pemulihan industri masih terkendala struktur ekonomi nasional yang masih cukup besar mengandalkan pada komoditas berbasis SDA. Selain itu, kecepatan perbaikan kinerja industri manufaktur yang berbeda antar daerah karena dipengaruhi kandungan teknologi dan orientasi pasar industri yang berbeda. Daerah dengan peran industri teknologi menengah-tinggi berorientasi ekspor dapat tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah lainnya. Pengecualian hanya dialami oleh daerah berbasis industri kelapa sawit yang mampu tumbuh tinggi pada 2021 karena didorong kenaikan harga komoditas di pasar global, meski hal ini berisiko ke depannya karena rentan dipengaruhi oleh fluktuasi harga dan permintaan (Grafik II.8). Divergensi juga diakibatkan masih rendahnya *linkage* antarindustri yang justru menjadi kunci untuk daya tahan dan kesiapan industri dalam menghadapi berbagai

<sup>2</sup> Sumber: GAIKINDO, diolah.

*shock*<sup>3</sup> sebagaimana yang terjadi pada masa pandemi. Ke depan, untuk mendukung pemulihan maupun mendukung pencapaian menuju negara maju maka penguatan peran industri perlu berfokus pada pengembangan industri hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah, berteknologi menengah-tinggi, serta *linkage* industri antarwilayah. Adopsi prinsip-prinsip produksi yang sejalan dengan ekonomi hijau juga perlu menjadi bagian penting dalam pengembangan industri ke depan. Arah kebijakan untuk mendukung pemulihan sekaligus memperkuat struktur industri akan diulas lebih lengkap pada Bagian III Isu Strategis: Mempercepat Pemulihan dan Penguatan Struktur Industri Manufaktur.



Sumber: Bank Indonesia, diolah  
Keterangan: Klasifikasi kandungan teknologi industri berdasarkan Lall (2000).

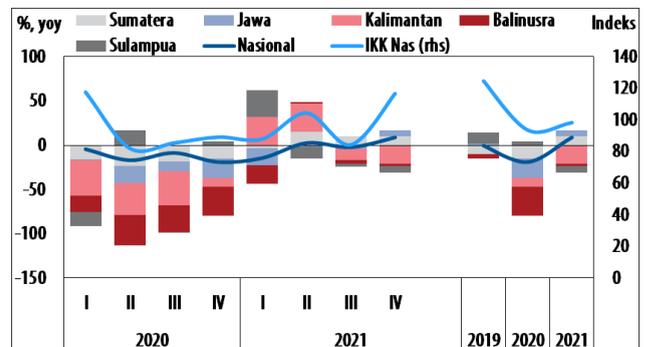
**Grafik II.8.** Impor Bahan Baku

## Perdagangan

**Kinerja LU Perdagangan pada triwulan IV 2021 di seluruh wilayah tumbuh lebih baik dari prakiraan sebelumnya.** Membaiknya aktivitas LU Perdagangan ini terutama didukung oleh peningkatan mobilitas seiring dengan penurunan kasus Covid-19 yang disertai pelonggaran PPKM Level, dan berlanjutnya akselerasi vaksinasi. Hal ini tercermin pada berbagai indikator terkini seperti penjualan eceran dan keyakinan konsumen (Grafik II.9), serta tingkat ketersediaan lapangan kerja. Selain itu, penjualan mobil hingga akhir 2021 tercatat meningkat hingga mencapai 66% dari capaian tahun lalu, didukung berlanjutnya kebijakan insentif PPnBM. Dengan perkembangan tersebut, maka kinerja LU Perdagangan secara keseluruhan tahun 2021 dapat tumbuh lebih tinggi dari prakiraan.

**Perbaikan kinerja LU Perdagangan diperkirakan terus berlanjut pada 2022 sejalan dengan meningkatnya konsumsi swasta.** Prakiraan ini didukung oleh mobilitas yang terus meningkat disertai berlanjutnya akselerasi vaksinasi, meski indikasi penyebaran varian baru Covid-19 pada awal tahun tetap perlu diwaspadai. Berbagai kebijakan

insentif yang akan berlanjut untuk mendorong konsumsi seperti perpanjangan insentif PPnBM untuk pembelian mobil dan PPN DTP untuk pembelian properti diperkirakan dapat menopang kinerja LU Perdagangan. Perkembangan transaksi *e-commerce* yang meningkat pesat ditengah pandemi juga diperkirakan terus terakselerasi sehingga dapat turut berkontribusi positif bagi kinerja LU Perdagangan, termasuk perdagangan antar daerah.



Sumber: Bank Indonesia  
**Grafik II.9.** Penjualan Eceran dan Indeks Keyakinan Konsumen

## Penyediaan Akomodasi & Makanan dan Minuman (Akmamin)

**Kinerja LU Akmamin pada triwulan IV 2021 diprakirakan terus membaik dan lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya.** Peningkatan kinerja LU Akmamin didukung oleh pelonggaran aktivitas masyarakat seiring dengan penurunan kasus Covid-19, termasuk pembatalan rencana kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat menjelang periode hari besar keagamaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Perkembangan ini diikuti pembukaan destinasi wisata di berbagai daerah dengan penerapan protokol standar *cleanliness, health, safety, and environment sustainability* (CHSE) yang semakin luas. Peningkatan kinerja LU Akmamin juga didorong pelaksanaan beberapa *event* berskala besar pada triwulan IV 2021, seperti World Super Bike (WSBK) di NTB, 1<sup>st</sup> FCBD G20 *meeting* di Bali, dan *Bali Democracy Forum*. Kendati demikian, aktivitas wisatawan nusantara (wisnus) menjadi penopang kinerja LU Akmamin ditengah masih terbatasnya wisatawan mancanegara (wisman). Secara keseluruhan 2021, kinerja LU Akmamin lebih baik dari prakiraan sebelumnya didukung peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas wisnus.

**Perbaikan LU Akmamin diperkirakan terus berlanjut pada 2022 meski dibayangi risiko kenaikan kasus Covid-19.** Prospek perbaikan LU Akmamin ditopang peningkatan mobilitas masyarakat, dengan ditunjang berlanjutnya akselerasi vaksinasi dan pembukaan tempat wisata secara aman. Di samping itu, berbagai program pemulihan pariwisata oleh pemerintah juga akan turut menjadi insentif

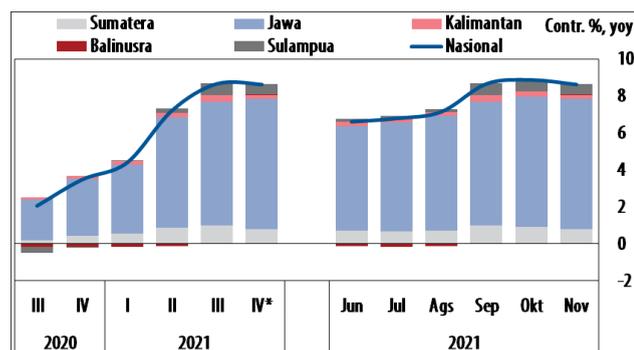
<sup>3</sup> Sumber: UNIDO, 2021

untuk mendorong peningkatan aktivitas wisnus, termasuk rencana pelaksanaan sejumlah *event* internasional pada tahun 2022 seperti Presidensi G20 di Bali dan MotoGP di NTB. Meski demikian, indikasi penyebaran varian baru Covid-19 pada awal tahun yang diikuti pengetatan restriksi mobilitas di sejumlah kota besar, termasuk destitansi wisata, dapat menahan peningkatan kinerja LU Akmamin lebih lanjut.

## Konstruksi

### Perbaikan kinerja LU Konstruksi pada triwulan IV 2021 berlanjut meski tidak setinggi prakiraan.

Perkembangan LU ini ditopang berlanjutnya pembangunan infrastruktur pemerintah dan proyek konstruksi swasta di berbagai daerah, seperti jalur kereta cepat, Pelabuhan Patimban, MRT fase II dan LRT, serta Kawasan Industri Batang di Jawa; percepatan penyelesaian jalan tol trans di Sumatera; pengembangan kawasan industri dan proyek hilirisasi tambang di Kalimantan dan Sulampua. Di samping itu, kinerja konstruksi juga ditopang meningkatnya permintaan properti di berbagai daerah seiring berlanjutnya kebijakan insentif pembelian properti seperti penurunan LTV/FTV dan diskon PPN DTP. Hal ini tercermin dari realisasi penjualan rumah oleh sejumlah pengembang besar yang meningkat diatas target awal disertai peningkatan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) - (Grafik II.9). Kendati demikian, mundurnya penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur pemerintah termasuk beberapa proyek strategis nasional menahan perbaikan kinerja LU konstruksi lebih lanjut. Dengan perkembangan tersebut, secara keseluruhan 2021 kinerja LU Konstruksi diperkirakan tumbuh membaik meski lebih rendah dari perkiraan sebelumnya.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.10. Perkembangan KPR

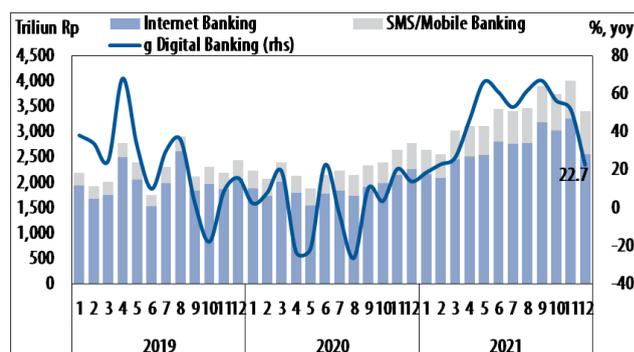
**Kinerja LU Konstruksi pada 2022 diprakirakan meningkat didukung penyelesaian proyek PSN dan berbagai proyek infrastruktur daerah.** Jumlah PSN yang ditargetkan akan selesai pada 2022 mencapai 31 proyek, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 24 proyek. Selain itu, sejumlah rencana investasi swasta seiring perbaikan permintaan domestik, prospek permintaan global yang tetap kuat, dengan didukung

membaliknya iklim investasi nasional turut mendorong kinerja LU Konstruksi. Di Jawa, aktivitas konstruksi didukung berlanjutnya pengerjaan sejumlah proyek di sektor transportasi. Di Sumatera terutama didorong oleh peningkatan anggaran konstruksi JJTS. Di Kalimantan antara lain didukung oleh pembangunan Kawasan Industri Hijau di Kaltara, serta proyek smelter baterai dan nikel di Kalsel. Sementara di Sulampua didukung berlanjutnya pembangunan sejumlah smelter dan tambang bawah tanah tembaga. Di Balinusra didorong pembangunan proyek smelter tembaga di NTB dan KEK Kesehatan di Bali. Di samping itu, meningkatnya target penjualan properti oleh pengembangan besar pada 2022 yang didukung berlanjutnya kebijakan insentif pembelian property, diperkirakan turut mendorong peningkatan kinerja LU Konstruksi.

## Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

### Transaksi ekonomi dan keuangan digital terus mengalami peningkatan.

Perkembangan ini turut dipengaruhi oleh preferensi masyarakat untuk berbelanja secara daring, sebagai bagian dari pola hidup *new normal*, untuk menghindari penyebaran Covid-19, yang didukung oleh implementasi pembayaran digital yang semakin luas (Grafik II.11). Hingga akhir triwulan IV 2021, nilai transaksi *digital banking* tercatat tumbuh 22,7% (yoy). Sementara nilai transaksi melalui Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), khususnya kartu ATM dan kartu debit, juga tumbuh 8,4% (yoy). Demikian halnya dengan nilai transaksi melalui Uang Elektronik (UE) pada triwulan IV 2021 yang juga meningkat 58,7% (yoy).

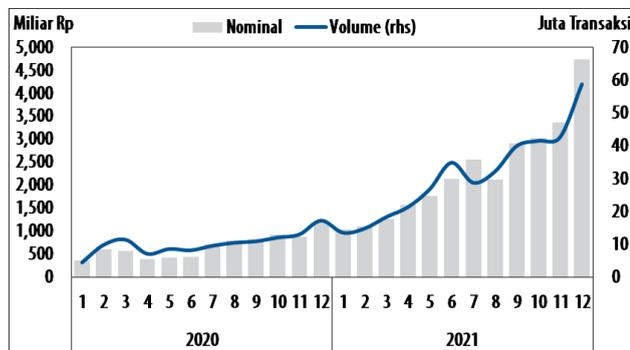


Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.11. Transaksi Digital Banking

Transaksi nilai kecil melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan IV 2021 secara nominal tercatat tumbuh 21,7% (yoy). Sementara itu, nominal transaksi nilai besar melalui Sistem BI *Real Time Gross Settlement* (RTGS) tumbuh 24,85% (yoy). Untuk mempercepat digitalisasi ekonomi keuangan nasional, dan integrasi ekosistem industri sistem pembayaran secara *end-*

to-end dari perbankan digital, *fintech*, *e-commerce*, dan konsumen, serta mendorong inklusi ekonomi keuangan, dan pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia telah meluncurkan Bank Indonesia *Fast Payment* (BI-FAST) pada akhir Desember 2021.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik II.12. Transaksi QRIS

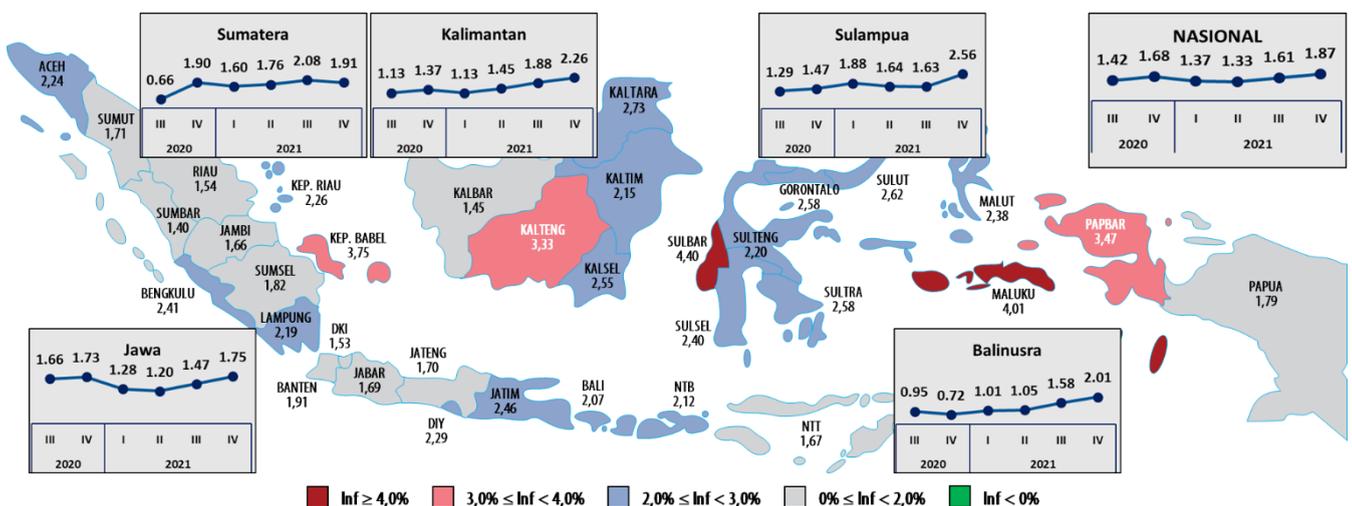
BI-FAST merupakan infrastruktur sistem pembayaran yang disediakan Bank Indonesia untuk memfasilitasi transaksi pembayaran ritel bagi masyarakat. Melalui BI-FAST, diharapkan pelaku industri akan terus berinovasi dengan mengoptimalkan *value added* layanan BI-FAST yang *consumer centric* sebagai pembuka jalan bagi inklusi keuangan dan pemulihan ekonomi melalui efisiensi transaksi. Selain itu, Bank Indonesia akan terus memperkuat ekosistem dan keuangan digital yang inklusif dan efisien, antara lain dengan melanjutkan akselerasi peningkatan transaksi dan perluasan *merchant* QRIS, yang secara volume dan nominal terus meningkat sampai dengan akhir 2021,

melalui dukungan oleh sinergi dengan asosiasi, industri, serta Kementerian/Lembaga terkait (Grafik II.12).

## Inflasi Daerah

**Inflasi di seluruh wilayah pada 2021 tetap rendah, didukung oleh ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi yang terjaga di tengah permintaan yang belum kuat.** Inflasi IHK secara nasional pada 2021 tercatat rendah sebesar 1,87% (yoy), meski lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar 1,68% (yoy). Realisasi inflasi wilayah Jawa dan Sumatera yang berada di bawah 2%, sementara capaian inflasi wilayah lainnya tercatat di atas 2% namun masih berada dalam kisaran sasaran  $3,0 \pm 1\%$ . Secara umum, rendahnya capaian inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh inflasi inti dan volatile foods (VF) yang terjaga, di tengah meningkatnya tekanan inflasi kelompok administered prices (AP).

**Inflasi inti yang rendah di seluruh wilayah sejalan dengan belum kuatnya permintaan domestik akibat pandemi Covid-19.** Rendahnya inflasi inti juga dipengaruhi oleh transmisi kenaikan harga global ke domestik yang terbatas, serta konsistensi kebijakan Bank Indonesia untuk selalu menjaga ekspektasi inflasi tetap terjangkau sesuai sasaran, dan stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya. Selain itu, berlanjutnya deflasi komoditas emas di mayoritas wilayah seiring penurunan harga emas global turut memengaruhi inflasi inti yang rendah, di tengah kenaikan inflasi sewa rumah di semua wilayah seiring membaiknya mobilitas masyarakat.



Sumber: BPS, diolah

Gambar II.2. Peta Inflasi Daerah

**Inflasi VF relatif terjaga terutama ditopang oleh melambatnya capaian inflasi VF di wilayah Jawa dan Sumatera.** Perkembangan tersebut didorong oleh deflasi komoditas cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, dan beras di mayoritas wilayah, didukung cuaca yang relatif

konduif sepanjang 2021 dan pasokan yang terjaga, di tengah peningkatan permintaan yang masih terbatas. Di sisi lain, berlanjutnya kenaikan harga minyak goreng akibat meningkatnya harga CPO global, serta daging ayam ras terkait upaya pemerintah untuk mengurangi oversupply di

mayoritas wilayah memberikan tekanan terhadap inflasi VF. Dinamika tingginya harga cabai rawit di awal dan akhir tahun serta faktor *base effect* rendahnya permintaan komoditas tersebut di tahun 2020 juga memberikan tekanan terhadap inflasi VF. Meski secara nasional terjaga, disparitas inflasi VF antardaerah pada 2021 meningkat seiring dengan kenaikan inflasi VF di wilayah Sulampua, Kalimantan dan Balinusra dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan inflasi VF di ketiga wilayah tersebut terutama didorong oleh kenaikan harga minyak goreng, cabai rawit, serta aneka ikan akibat gangguan cuaca, di tengah sejumlah kendala struktural produksi yang masih menjadi tantangan.

**Inflasi kelompok AP meningkat di semua wilayah.**

Kenaikan inflasi AP terutama disumbang oleh tarif angkutan, khususnya angkutan udara di semua wilayah dan angkutan dalam kota di mayoritas wilayah, sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat pascapelonggaran pembatasan mobilitas. Tekanan inflasi AP juga bersumber

dari kenaikan inflasi tarif tol khususnya di Jawa dan Sulampua, serta bahan bakar rumah tangga (BBRT) di semua wilayah seiring kenaikan BBM dan LPG nonsubsidi pada semester II 2021. Kenaikan inflasi AP yang lebih tinggi tertahan oleh melambatnya inflasi rokok di semua wilayah seiring pengenaan tarif cukai rokok yang lebih rendah dibandingkan tahun 2020, di tengah permintaan yang belum kuat.

**Ke depan, inflasi tahun 2022 diperkirakan terkendali dalam kisaran sasaran 3,0%±1%.**

Prakiraan tersebut sejalan dengan masih memadainya penawaran agregat dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat, tetap terkendalinya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta respon kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah. Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) guna menjaga inflasi IHK dalam kisaran targetnya.

## BAGIAN 3

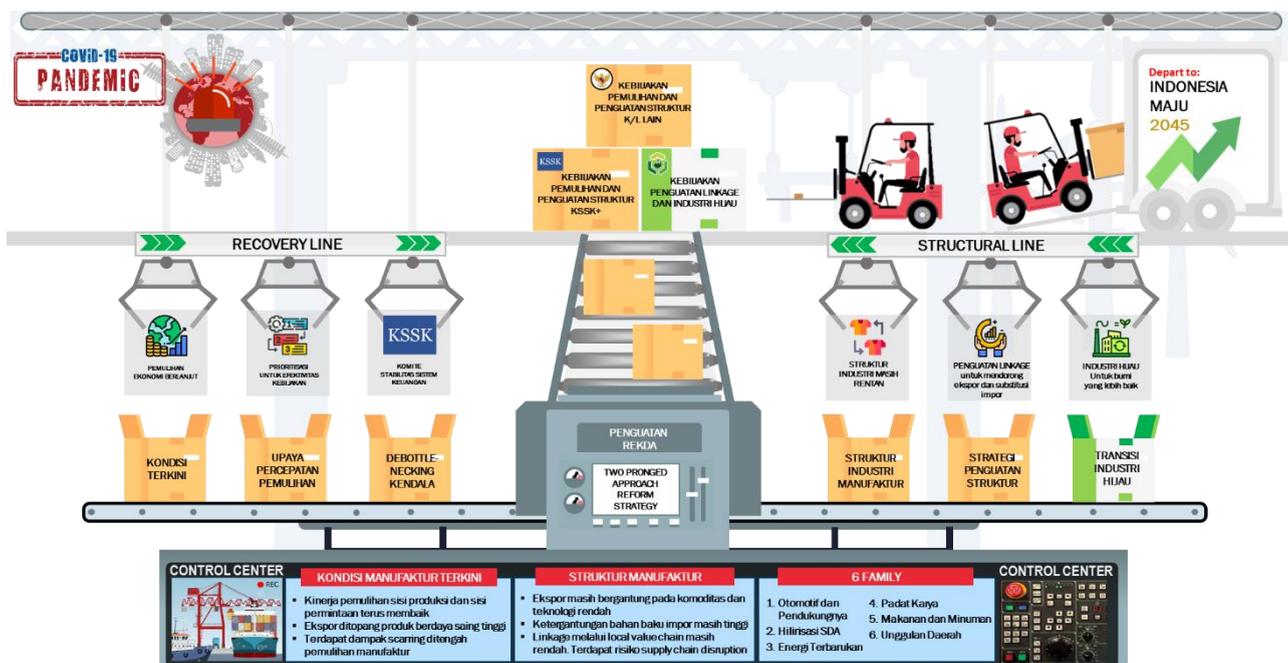
# Isu Strategis: Mempercepat Pemulihan dan Penguatan Struktur Industri Manufaktur

### Pendahuluan

Sejalan dengan upaya transformasi Indonesia menuju negara maju, perekonomian Indonesia perlu tumbuh secara berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, struktur neraca transaksi berjalan yang kuat dan sehat perlu terus didorong, salah satunya melalui penguatan industri manufaktur berorientasi ekspor yang bernilai tambah tinggi, diselaraskan dengan penguatan substitusi impor. Berbagai kebijakan secara konsisten telah diimplementasikan oleh pemerintah untuk terus mendorong penguatan struktur industri manufaktur, di samping kebijakan percepatan pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19.

**Pemulihan industri manufaktur yang terus berlangsung, berjalan secara selaras dengan proses penguatan struktur industri manufaktur dengan tetap didasarkan pada pendekatan *Two Pronged Approach Reform Strategy*.** Berdasarkan hasil asesmen terkini, kondisi kinerja industri manufaktur terus melanjutkan pemulihan, utamanya didorong oleh ekspor produk industri manufaktur yang berdaya saing. Sementara itu, perbaikan permintaan domestik masih berlangsung secara bertahap, didukung oleh pelonggaran level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Di tengah proses pemulihan industri

manufaktur yang terus berlanjut, upaya penguatan struktur industri manufaktur perlu terus didorong. Hingga kini, kondisi struktur industri manufaktur masih dihadapkan pada tantangan, seperti ekspor yang secara umum masih didominasi oleh produk berbasis sumber daya alam (SDA) dan produk dengan tingkat pengolahan yang relatif rendah. Selain itu, ketergantungan terhadap bahan baku impor masih tinggi. Demikian pula dengan keterkaitan (*linkage*) antarindustri dan antarwilayah yang belum cukup kuat, di tengah tantangan terkait transisi menuju ekonomi hijau yang semakin mengemuka. Oleh karena itu, penguatan struktur industri manufaktur dilakukan dengan tetap mendasarkan pada *two pronged approach reform strategy*, yaitu: (i) penguatan industri *medium-high technology product* yang mendukung peningkatan nilai tambah dan mendorong ekspor dan/atau substitusi impor; serta (ii) penguatan industri *low technology product* dan padat karya, serta industri dasar pendukung melalui hilirisasi produk SDA. Selanjutnya, perumusan strategi kebijakan dilakukan dengan pendekatan *end-to-end* untuk memperkuat *linkage* khususnya *local value chain* (LVC). Penguatan *linkage* ini diarahkan untuk meningkatkan substitusi impor dan ekspor bernilai tambah tinggi, serta mampu menggerakkan ekonomi antarwilayah dan mendukung transisi menuju ekonomi hijau.



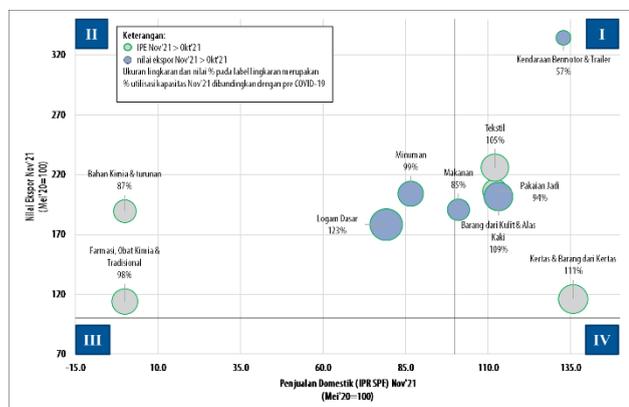
Sumber: Bank Indonesia

Gambar III.1. Mempercepat Pemulihan dan Penguatan Struktur Industri Manufaktur

**Penguatan strategi kebijakan secara *end-to-end* berfokus pada empat *family* produk utama.** Asesmen penentuan *family* produk utama dilakukan berdasarkan pemetaan produk unggulan manufaktur yang memenuhi beberapa kriteria yaitu permintaan domestik, permintaan eksternal, dan daya saing, serta memperhatikan potensi *scarring effect*. Keempat *family* produk tersebut, yaitu: (i) *family* industri otomotif dan pendukungnya (komoditas karet, bauksit, alumina, aluminium, sepeda motor, dan mobil); (ii) *family* hilirisasi sumber daya alam (komoditas nikel, tembaga, *stainless steel*, *carbon steel*, baterai EV); (iii) *family* makanan dan minuman (komoditas CPO, kakao, perikanan, udang, kopi, rumput laut, garam, mamin kemasan); dan (iv) *family* industri padat karya (komoditas petrokimia, karet, TPT, alas kaki, kertas).

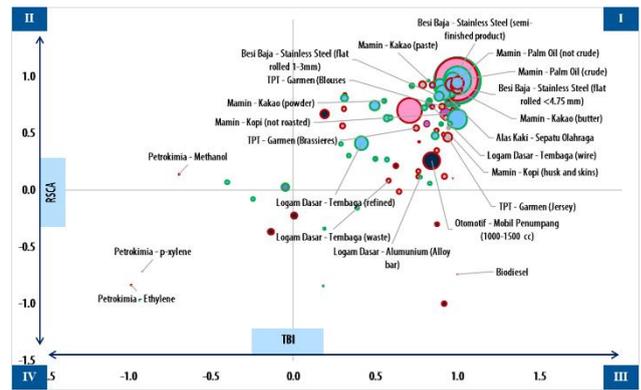
## Pemulihan Industri Manufaktur

**Berlanjutnya pemulihan industri manufaktur terus didorong oleh perbaikan permintaan eksternal, di tengah kondisi permintaan domestik yang membaik terbatas (Grafik III.1).** Kinerja industri manufaktur tumbuh 3,68% (yoy) pada triwulan III 2022, atau meningkat cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terkontraksi sebesar 4,34% (yoy). Perkembangan kinerja positif tersebut utamanya disebabkan oleh tingginya pertumbuhan ekspor yang mencapai 29,16% (yoy) pada kuartal ketiga tahun 2021, di tengah pertumbuhan konsumsi domestik yang masih relatif tertahan, sebesar 1,03% (yoy). Secara struktural, beberapa produk unggulan ekspor Indonesia tetap berdaya saing dan memiliki *trade balance* yang positif di tengah pandemi, atau berada pada kuadran A dalam matriks *Revealed Symmetric Comparative Advantage* (RSCA) dan *Trade Balance Index* (TBI) (Grafik III.2). Perkembangan kinerja tersebut berimplikasi positif pada peningkatan utilisasi kapasitas industri manufaktur yang telah berada di *level* 67,6% pada bulan November 2021 atau mencapai 89% dari tingkat utilisasi kapasitas sebelum pandemi Covid-19.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik III.1.** Pemetaan Kinerja Ekspor dan Penjualan Domestik Industri Manufaktur



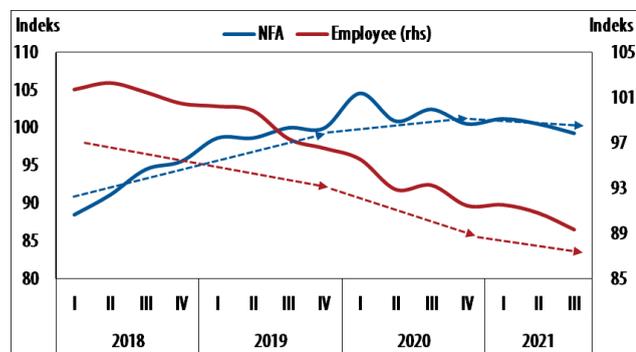
Sumber: WITS, diolah

**Grafik III.2.** Pemetaan Komoditas Ekspor – RSCA & TBI

**Upaya akselerasi pemulihan kinerja industri manufaktur didukung berbagai kebijakan pemerintah, baik berupa insentif usaha maupun aturan pembukaan industri yang mengedepankan penguatan protokol kesehatan.** Salah satu upaya untuk mendukung percepatan pemulihan sekaligus tetap mendorong penguatan struktur industri manufaktur secara berkelanjutan adalah dengan penguatan sinergi kebijakan melalui forum KSSK. Perwujudan hal ini berupa Paket Kebijakan Terpadu dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi yang diluncurkan pada Februari 2021. Berdasarkan *monitoring* yang dilakukan secara berkala, relaksasi kebijakan tersebut dimanfaatkan cukup optimal oleh pelaku usaha industri manufaktur. Sementara itu, pembukaan industri terus diperluas seiring semakin membaiknya tingkat PPKM di berbagai daerah. Lebih lanjut, kebijakan tersebut mendorong tingginya jumlah industri pemegang IOMKI yang tercatat telah mencapai 17.746 industri pada awal Januari 2022. Implementasi kebijakan IOMKI turut diseleraskan dengan strategi perluasan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi pada kawasan industri sebagai bentuk penguatan pengawasan terhadap protokol kesehatan di lingkungan kerja. Di samping itu, upaya akselerasi vaksinasi pekerja industri manufaktur juga terus diperkuat, tampak dari realisasi vaksinasi untuk 4,81 juta pekerja yang telah mendapatkan vaksin dosis pertama pada periode yang sama.

**Pemulihan kinerja industri manufaktur masih dibayangi oleh potensi *scarring effect* terutama pada sektor ketenagakerjaan.** Berdasarkan berbagai literatur, pandemi Covid-19 berpotensi menyebabkan *scarring effect* (*permanent damage*) pada sektor perekonomian. IMF (2021) menyebutkan bahwa krisis yang berkepanjangan dapat menurunkan kapasitas perekonomian secara permanen (*scarring* atau *permanent damage*) melalui beberapa *channel*: (i) *unemployment* yang tetap tinggi saat *post-crisis* (Blanchard & Summers, 1986); (ii) penurunan produktivitas (Bernstein et al, 2019); dan (iii) investasi rendah yang berpengaruh pada kapasitas terpasang. Indikasi risiko

*scarring* di Indonesia tercermin dari penurunan serapan tenaga kerja pada beberapa sektor lapangan usaha prioritas terutama selama pandemi Covid-19. Di sisi lain, pemulihan kapasitas usaha mulai terjadi sebagaimana tercermin dari kapasitas terpasang (Grafik III.3).



Sumber: Bloomberg, diolah

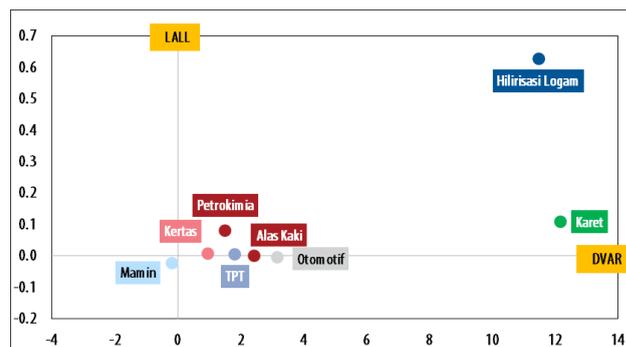
**Grafik III.3.** Potensi *Scarring* Menjadi Risiko Pemulihan Manufaktur

Di samping potensi *scarring effect*, pemulihan kinerja industri manufaktur turut dihadapkan pada sejumlah tantangan dari perubahan lingkungan strategis, baik dari domestik maupun eksternal. Tantangan tersebut, antara lain, permintaan domestik yang masih tumbuh terbatas, pemanfaatan beberapa kebijakan yang masih belum optimal, hingga gangguan *global supply chains* sebagai imbas kelangkaan kontainer dan kapal kargo. Oleh karenanya, dalam jangka pendek penguatan strategi untuk menjaga prospek kinerja manufaktur dilakukan dengan mengidentifikasi kendala kritis yang dihadapi industri secara menyeluruh dan formulasi kebijakan *debottlenecking* yang diperlukan. Strategi kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya mampu mendorong pemulihan aktivitas ekonomi khususnya sektor manufaktur yang terdampak pandemi Covid-19, namun juga penguatan struktur industri untuk mendukung pencapaian visi Indonesia 2045 sebagai negara maju berpendapatan tinggi.

## Penguatan Struktur Industri Manufaktur Melalui Pendekatan *Linkage Family*

**Strategi penguatan struktur industri manufaktur secara konsisten tetap diarahkan untuk mengatasi berbagai tantangan struktural di dalam negeri.** Berbagai tantangan tersebut meliputi: (i) masih tingginya produk *low technology* dalam struktur ekspor Indonesia; (ii) ketergantungan akan impor bahan baku maupun barang antara untuk produksi manufaktur; (iii) *linkage local value chain* yang belum optimal, baik antarwilayah maupun antarindustri; serta (iv) transisi industri hijau yang perlu terus diakselerasi. Berdasarkan perumusan strategi kebijakan yang bersifat *end-to-end*, maka penguatan struktur industri manufaktur

berfokus pada penguatan *linkage*, strategi ini diarahkan untuk dapat meningkatkan substitusi impor dan ekspor bernilai tambah tinggi, serta mampu menggerakkan ekonomi antarwilayah dan mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Dalam mengatasi tantangan dari sisi ekspor, penguatan *linkage* dengan jaringan suplai lokal menjadi salah satu dari tiga strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ekspor melalui partisipasi ke *Global Value Chain* (GVC) (UNIDO, 2017). Strategi ini perlu terus ditempuh, mengingat peran input domestik dalam memproduksi barang yang diekspor oleh kedelapan industri utama yang diproksi dengan menggunakan *domestic value added ratio* (DVAR) antara periode 2017-2020 menunjukkan peningkatan yang belum merata. Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan tantangan struktur ekspor, berdasarkan hasil pemetaan kinerja industri dengan mengadopsi klasifikasi tingkat teknologi yang diperkenalkan oleh Lall, S. (2015), terlihat bahwa peningkatan komposisi tingkat teknologi produk ekspor pada 8 industri utama antara periode 2017-2020 berlangsung secara terbatas, kecuali industri logam dasar (Grafik III.4).



Sumber: WITS, diolah

**Grafik III.4.** Terdapat Peluang Penguatan Value Added Domestik untuk Ekspor dan Ekspor Berteknologi Tinggi

Berkaitan dengan tantangan dari sisi impor, masih tingginya impor bahan baku dan barang antara membuat aktivitas produksi industri manufaktur dibayangi oleh sejumlah risiko. Berdasarkan kondisi terkini, impor barang industri baik berupa barang jadi maupun untuk kepentingan industri mencapai 90,5% dari total komoditas impor nasional. Impor nasional tersebut terdiri dari 72,1% impor bahan baku dan 14,7% impor barang modal. Risiko terkait masih tingginya impor ini berkaitan dengan terkonsentrasinya sumber impor pada beberapa negara mitra dagang, salah satunya ialah Tiongkok yang mencapai 30,5%. Risiko ini dapat menguat seiring dengan tren peningkatan kebijakan *inward looking* oleh beberapa negara dalam 10 tahun terakhir. Di tengah fakta bahwa produk industri yang diekspor bergantung pada bahan baku yang masih diimpor, risiko-risiko tersebut dapat berimplikasi pada resiliensi ekspor nasional.

**Dinamika perubahan kondisi eksternal sebagai dampak pandemi Covid-19 juga perlu direspons secara lebih**

**struktural agar meminimalisir *spillover effect* ke depan.**

Pemulihan ekonomi yang terjadi secara bersama-sama dan dalam jangka waktu yang relatif berdekatan menyebabkan terjadinya fenomena disrupsi suplai global. Hal tersebut berdampak pada terganggunya rantai pasok global yang dimulai dari kenaikan biaya logistik sejalan dengan terbatasnya jumlah kontainer maupun kapal kargo yang melakukan pelayaran sebagai imbas dari kebijakan *lockdown* di beberapa negara. Selama tahun 2021, tarif kontainer global telah mengalami kenaikan sebesar 113% (yoy). *Data freight rate index* untuk kontainer 40 feet masih tercatat tinggi mencapai 9.304 dolar AS pada minggu keempat Desember 2021 seiring masih berlangsungnya *port congestion*, terutama di pantai barat Amerika Serikat. Kenaikan tarif kontainer global tersebut turut ditransmisikan ke tarif penyewaan domestik, yang juga mengalami kenaikan sampai dengan 50%, disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan kontainer dalam negeri seiring tingginya permintaan untuk pemenuhan aktivitas ekspor-impor.

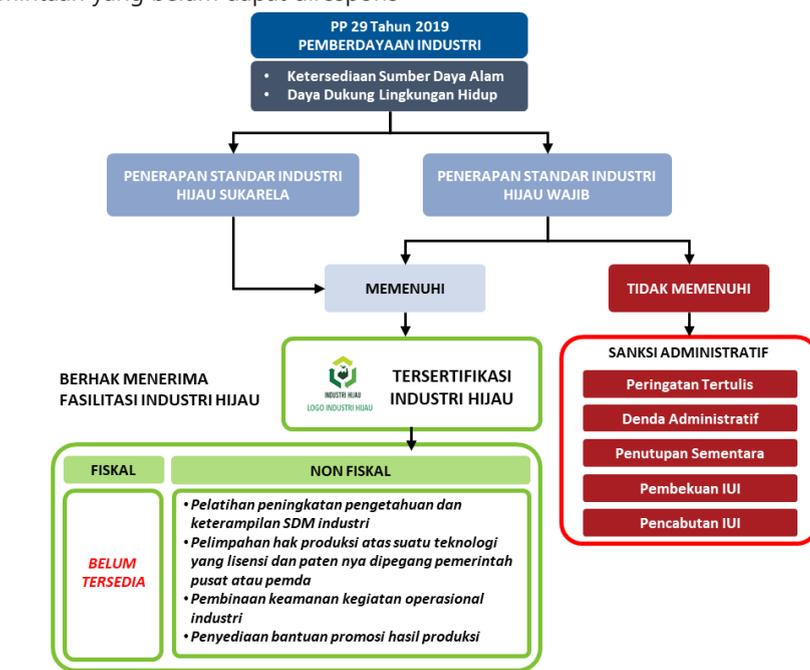
Selain itu, upaya *power rationing* yang diberlakukan di Tiongkok pada kuartal III 2021, juga sempat menjadi risiko bagi kinerja ekspor dalam negeri. Secara umum, pembatasan konsumsi energi dilatarbelakangi oleh upaya Tiongkok dalam mendukung pencapaian target *energy intensity*, di tengah kenaikan harga batubara sebagai imbas ketatnya suplai domestik. Hal tersebut berpotensi menurunkan kinerja ekspor Indonesia ke Tiongkok, terutama beberapa komoditas unggulan, seperti besi baja dan *pulp*.

Kendala lainnya yang mengemuka pada 2021 berkaitan dengan kelangkaan semikonduktor secara global sejalan dengan tingginya permintaan yang belum dapat direspons

dengan kenaikan produksi. Kelangkaan semikonduktor juga menjadi salah satu risiko yang berpotensi mengganggu kinerja industri alat angkutan domestik. Waktu tunggu pemesanan (*leadtime*) semikonduktor di pasar global sempat mencapai 26,5 minggu, atau jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi normal yang berada di kisaran 6-10 minggu. Namun, kelangkaan semikonduktor masih berdampak terbatas pada produksi otomotif domestik karena mayoritas jenis kendaraan yang diproduksi masih merupakan *low-tech car* dengan kebutuhan semikonduktor yang minim. Berbagai kendala yang terjadi sebagai dampak lanjutan dari pandemi Covid-19 menunjukkan pentingnya penguatan struktur industri dalam negeri, terutama penguatan *linkage* yang turut mendorong substitusi impor.

**Strategi penguatan industri manufaktur perlu disertai upaya bertransisi menuju industri hijau.**

Salah satu kendala utama dalam akselerasi menuju industri hijau ialah besarnya *transition cost* yang diperlukan, baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Upaya dalam menjadikan Indonesia sebagai *net zero emissions country* dimulai dengan melakukan transisi energi kelistrikan yang berbasis batubara menuju energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Hal tersebut didasari oleh tingginya emisi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik batubara, mencapai sebesar 1.310 ton Co<sup>2</sup>e/GWh atau jauh lebih tinggi dari emisi yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik tenaga angin yang hanya 124 ton Co<sup>2</sup>e/GWh. Namun demikian, tingginya biaya yang diperlukan untuk investasi di sektor energi terbarukan masih menjadi kendala utama rendahnya minat pelaku usaha dalam mendukung program tersebut.



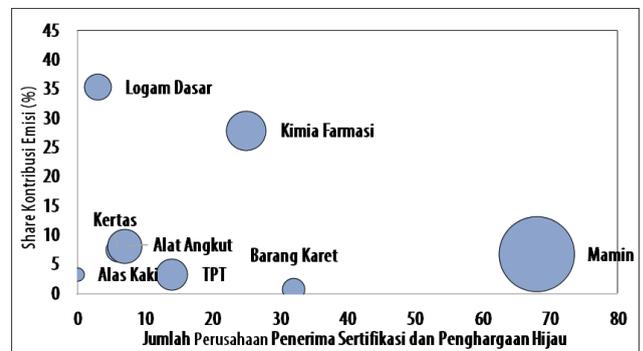
Sumber: Kemenperin

Gambar III.2. Penguatan Insentif Industri Hijau

Tantangan berikutnya ialah rencana implementasi *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) oleh Uni Eropa yang akan dimulai secara bertahap sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. CBAM adalah pengukuran harga karbon yang terkandung dalam barang yang diimpor oleh Uni Eropa sesuai Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa. Importir UE akan diwajibkan membeli sertifikat karbon sesuai harga karbon yang seharusnya dibayarkan dengan tingkat harga barang yang diproduksi di bawah aturan penetapan harga karbon UE. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung target Uni Eropa sebagai benua pertama yang mencapai *carbon neutral* pada 2050. Pada tahap awal, CBAM akan diimplementasikan pada 5 komoditas yang dianggap menyumbang emisi karbon paling tinggi, yakni semen, besi baja, pupuk, aluminium, dan listrik. Dari perspektif Indonesia, pangsa ekspor kelima komoditas tersebut terhadap total ekspor Indonesia ke Uni Eropa masih sangat kecil (1,63%), namun hal ini perlu dicermati apabila komoditas ekspor yang dikenakan CBAM bertambah di masa mendatang, atau bahkan diperluas oleh negara/kawasan lainnya.

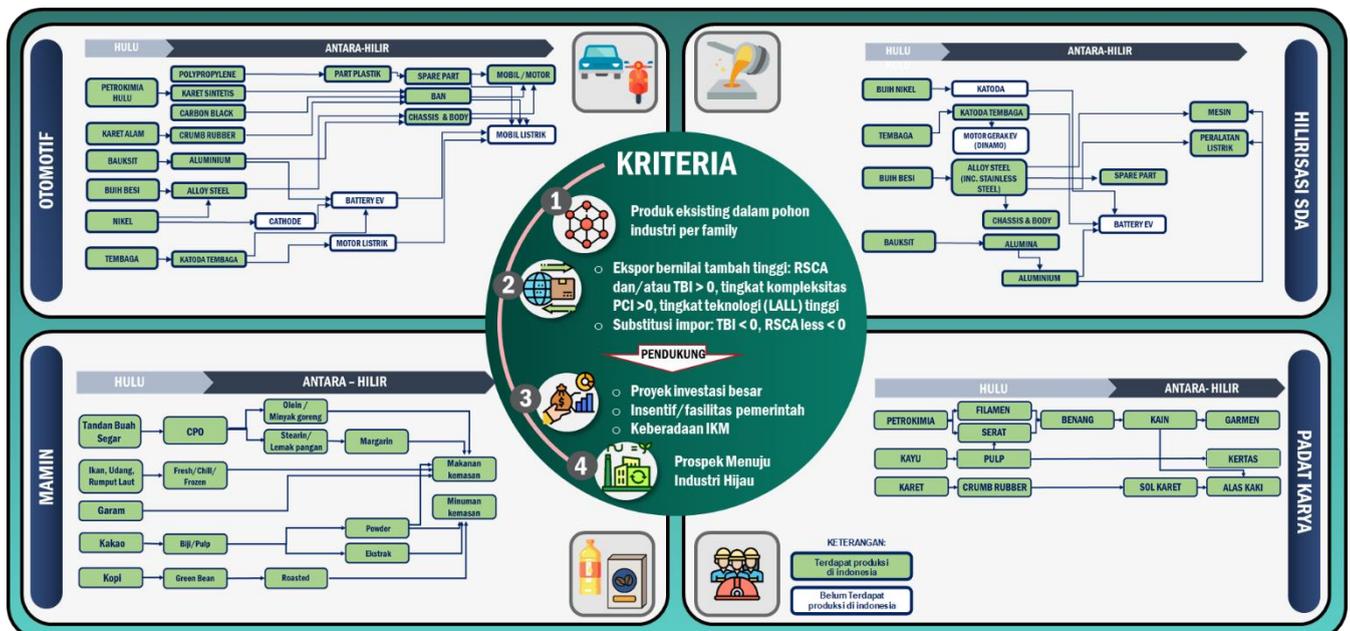
Dihadapkan pada tantangan biaya transisi yang besar dan rencana penerapan pajak karbon produk industri di luar negeri, maka upaya transisi dan peningkatan kesiapan industri di Indonesia menuju industri hijau perlu didukung oleh insentif. Saat ini, implementasi regulasi untuk mendorong transisi menuju industri hijau belum berjalan optimal karena masih bersifat sukarela. Ke depan,

penerapan regulasi ini akan diwajibkan secara bertahap. Dengan adanya standar industri hijau, maka perusahaan yang sudah tersertifikasi sesuai standar hijau tersebut bisa mendapatkan fasilitas fiskal dan nonfiskal (Gambar III.2). Saat ini, telah terdapat berbagai insentif nonfiskal seperti pelatihan, pembinaan, penyediaan bantuan promosi. Namun, insentif fiskal hingga saat ini belum tersedia. Hal ini ditengarai menjadi penyebab masih sedikitnya jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam program industri hijau. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tercatat baru 44 perusahaan yang telah tersertifikasi industri hijau (SIH) sejak tahun 2017 (Grafik III.5). Untuk mendorong adopsi SIH, Kemenperin terus mendorong percepatan penyusunan Standar Industri Hijau (SIH) untuk beragam industri, dari saat ini telah tersedia bagi 28 Industri.



Sumber: Kemenperin, Herzog (2005), Payet (2021), diolah

**Grafik III.5.** Partisipasi Perusahaan dalam Program Industri Hijau



Sumber: Bank Indonesia

**Gambar III.3.** Kriteria Pengembangan *Linkage* untuk Mendukung Penguatan Struktur Manufaktur

Upaya mendorong penguatan struktur industri manufaktur ditempuh melalui strategi pengembangan *linkage*, dengan mengidentifikasi produk potensial

yang dapat meningkatkan kinerja ekspor bernilai tambah tinggi maupun substitusi impor. Sebagai tahap awal, identifikasi produk unggulan dilakukan dengan

menganalisis pohon industri untuk masing-masing *family* untuk memilah produk eksisting yang telah diproduksi di dalam negeri. Dari pemetaan produk dalam pohon industri tersebut, diidentifikasi potensi pengembangan *local value chain* berdasarkan sejumlah kriteria, yang meliputi daya saing, feasibilitas dan dukungan kebijakan, serta prospek industri hijau. Pengukuran tingkat daya saing untuk masing-masing produk hasil identifikasi pohon industri tersebut dilakukan dengan menghitung RSCA (*Revealed Symmetric Comparative Advantage*), TBI (*Trade Balance Index*), PCI (*Product Complexity Index*), dan indeks klasifikasi teknologi produk Lall (Gambar III.3). Secara lebih detil, analisis menggunakan RSCA dan TBI dimaksudkan untuk mengidentifikasi tingkat daya saing produk ekspor tertentu dan melihat kondisi neraca perdagangan komoditas tersebut. Sementara, indikator PCI difokuskan untuk mengukur tingkat kompleksitas produk dimaksud, untuk kemudian dilengkapi dengan identifikasi penggunaan teknologinya melalui penghitungan skor berdasarkan klasifikasi tingkat teknologi dari kajian Lall, S (2015). Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, maka dapat direkomendasikan beberapa produk unggulan untuk mendukung pengembangan dan penguatan asesmen lebih lanjut, baik yang diarahkan untuk mendorong ekspor maupun substitusi impor sebagai berikut:

- a. *Family* Otomotif,
  - Champion Product* Eskpor; mobil, dan motor
  - Champion Product* Substitusi Impor; polypropylene, dan carbon black
- b. *Family* Hilirisasi SDA,

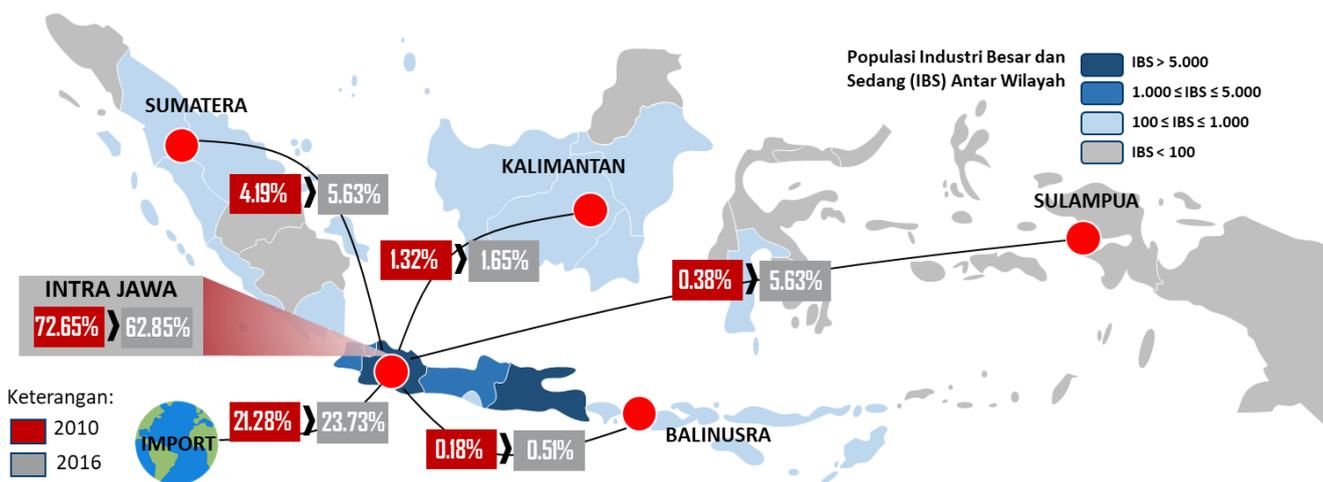
*Champion Product* Eskpor; stainless steel  
*Champion Product* Substitusi Impor; katoda tembaga, dan alloy steel

- c. *Family* Makanan dan Minuman,
  - Champion Product* Eskpor; oleostearin, oleofood, refined palm oil, dan coffee bean (green bean)
- d. *Family* Padat Karya,
  - Champion Product* Eskpor; serat (Viscose Rayon Staple Fiber), dan kertas
  - Champion Product* Substitusi Impor; Purified Terephthalic Acid (PTA)

### Family Otomotif

**Linkage industri otomotif antar wilayah (di luar Jawa) menunjukkan perbaikan, di tengah peningkatan peran teknologi dalam proses produksinya.** Peningkatan tertinggi dalam rantai nilai industri otomotif terjadi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) sebesar 5,63% di tahun 2016, dari sebelumnya hanya 0,38% pada 2010 (Gambar III.4).

Cukup tingginya kenaikan tersebut didorong oleh upaya hilirisasi produk sumber daya alam yang menjadi bagian *input* dari proses produksi dalam industri alat angkutan. Selain itu, kenaikan *linkage* juga terjadi di Sumatera sejalan meningkatnya kebutuhan akan karet alam sebagai campuran utama pembuatan ban kendaraan roda dua maupun empat domestik. Sementara itu, ekspor produk *family* otomotif telah masuk ke dalam kategori *Medium Technology Manufactures* berdasarkan asesmen menggunakan klasifikasi Lall. Pangsa produk dengan kategori tersebut mencapai 62,7% di tahun 2020, atau naik dari tahun 2018 yang sebesar 57,7% (Grafik III.6).



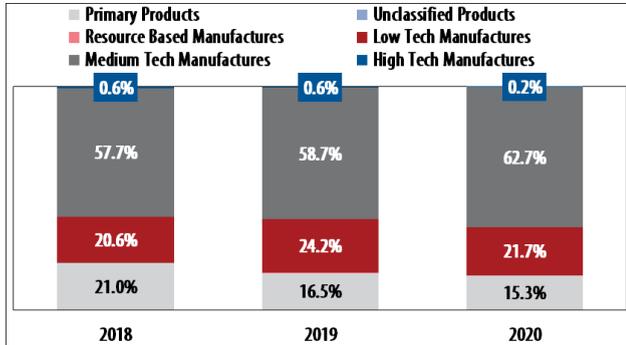
Sumber: Tabel IO/IRIO 2016, diolah

Gambar III.4. Pemetaan Linkage Antarwilayah Family Otomotif

**Dukungan penguatan linkage IKM ke industri otomotif, serta insentif bagi pengembangan kendaraan listrik perlu terus didorong untuk pertumbuhan kinerja industri yang lebih solid.** IKM yang mendukung *linkage* ke komponen domestik baru berkontribusi sebesar 25% pada rantai pasok otomotif domestik, atau lebih rendah

dibandingkan kontribusi IKM di Thailand yang mencapai 45%. Sebagian besar IKM juga masih berada pada tier 2 (komponen pelengkap) dan tier 3 (komponen tambahan) pada rantai pasok industri. Berbeda dengan IKM di Thailand yang telah mampu untuk memasok sampai dengan tier 1 (komponen inti) pada industri tersebut. Beberapa kebijakan

pemerintah perlu terus didorong dan diperluas implementasinya, antara lain pembentukan/pengembangan sentra produksi, pengembangan kompetensi teknis sumber daya manusia, penguatan kualitas produk, pendampingan sertifikasi ISO, serta penguatan akses pasar dan kemitraan dengan pabrik besar.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

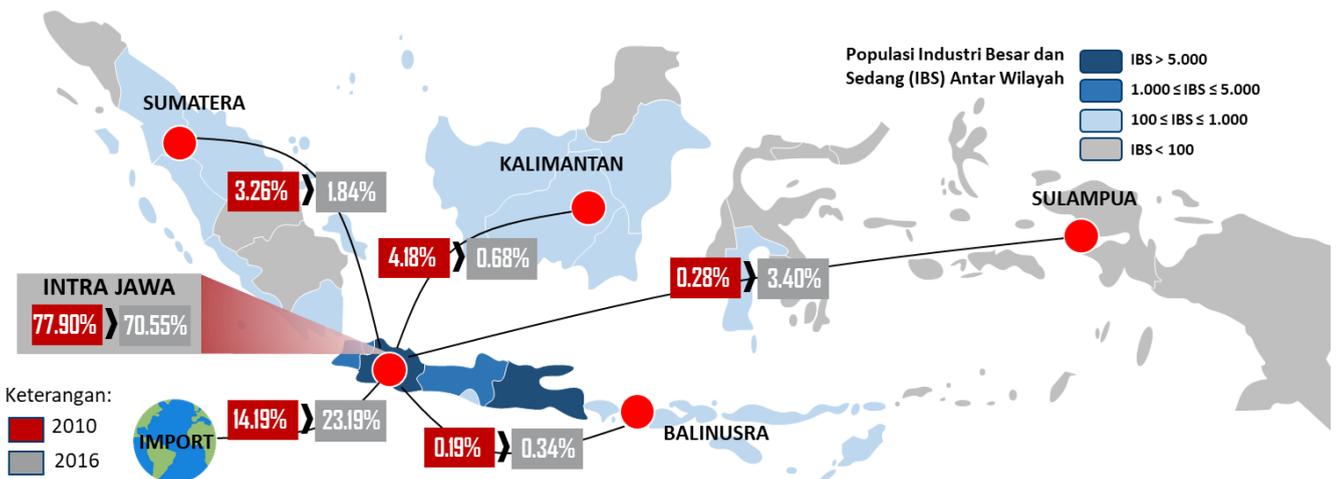
**Grafik III.6.** Ekspor Family Otomotif Berdasarkan Tingkat Teknologi

Selain itu, insentif untuk pengembangan kendaraan listrik juga perlu didorong seiring masih tingginya biaya produksi beberapa komponen utamanya, seperti baterai Electric Vehicle (EV). Harga EV yang masih jauh di atas harga kendaraan Internal Combustion Engine (ICE) serta masih belum berkembangnya infrastruktur pendukung (ekosistem) operasional EV menahan perluasan pasar EV domestik. Masih minimnya investasi untuk produsen

kendaraan EV seiring pemanfaatannya yang rendah juga menyebabkan belum optimalnya produksi kendaraan ramah lingkungan tersebut di Indonesia. Sementara itu, strategi peningkatan produksi untuk EV juga perlu diimbangi dengan penguatan transisi industri otomotif menuju industri hijau secara terintegrasi, namun saat ini belum terdapat perusahaan otomotif yang tersertifikasi industri hijau (SIH).

### Family Hilirisasi SDA

**Masifnya pembangunan smelter di Kawasan Indonesia Timur (KTI) mendorong perbaikan linkage antar wilayah dan penggunaan teknologi dalam meningkatkan kinerja produksinya.** Berdasarkan analisis IRIO, perkembangan linkage dari wilayah Sulampua ke wilayah produksi tercatat mengalami kenaikan tertinggi dibandingkan wilayah lainnya, menjadi 3,40% (2016) dari sebelumnya 0,28% (2010) (Gambar III.5). Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh kuatnya upaya hilirisasi SDA, seperti nikel. Hal tersebut turut didukung oleh regulasi yang kuat, baik dari sisi pelarangan ekspor komoditas mentah maupun insentif fiskal untuk menarik investasi dalam pembangunan smelter. Keberhasilan dalam mendorong produk hilirisasi SDA tersebut juga tercermin dari komposisi ekspor produk pada family ini yang didominasi oleh produk kategori *Medium Technology Manufactures*. *Progressnya* pun meningkat signifikan dari hanya 29,7% di tahun 2018 menjadi 46,6% pada 2020 (Grafik III.7).



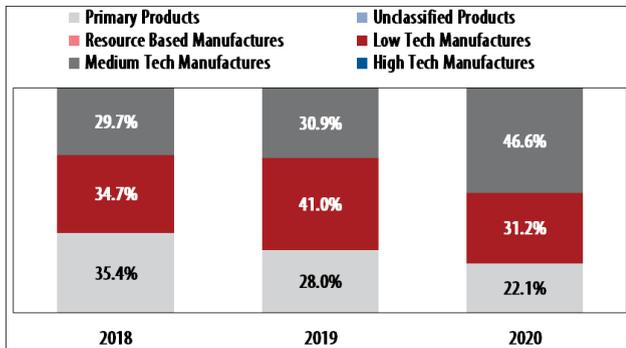
Sumber: Tabel IO/IRIO 2016, diolah

**Gambar III.5.** Pemetaan Linkage Antarwilayah Family Hilirisasi SDA

**Penguatan aturan tata niaga dan dukungan untuk transisi menuju industri hijau perlu ditingkatkan sejalan masih minimnya nilai tambah industri hulu dan rumitnya pengolahan limbah hasil hilirisasi.** Meskipun sejumlah investasi dalam nominal yang besar masih akan berjalan di tahun 2022, namun upaya hilirisasi berbagai komoditas SDA masih perlu terus diperkuat sejalan dengan potensi pengembangannya yang masih sangat besar ke depan. Beberapa kendala dalam merealisasikan produk

turunan bernilai tambah ialah *mismatch* antara produksi dengan kebutuhan industri hilir dan tingginya afiliasi produsen dalam negeri dengan induk perusahaannya di luar negeri. Salah satu contohnya ialah produksi komoditas alumina dan tembaga domestik yang tercatat cukup berlimpah, namun sebagian besar masih ditujukan untuk ekspor karena adanya perjanjian perdagangan dengan induk perusahaan. Di sisi lain, serapan domestik untuk produksi hilir aluminium nasional juga masih tercatat

rendah dikarenakan *mismatch* kualitas. Konsumsi bahan baku domestik hanya sebesar 40% dari total kebutuhan bahan baku industri, sehingga sisanya sebanyak 60% masih dipenuhi oleh impor dari Australia, Tiongkok, dan India. Ke depan, diperlukan aturan tata niaga yang lebih jelas, terutama dalam mendorong disinsentif ekspor untuk industri hulu dan penyamaan spesifikasi maupun kualitas yang diproduksi dengan kebutuhan industri hilir nasional.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik III.7.** Ekspor Family Hilirisasi SDA Berdasarkan Tingkat Teknologi

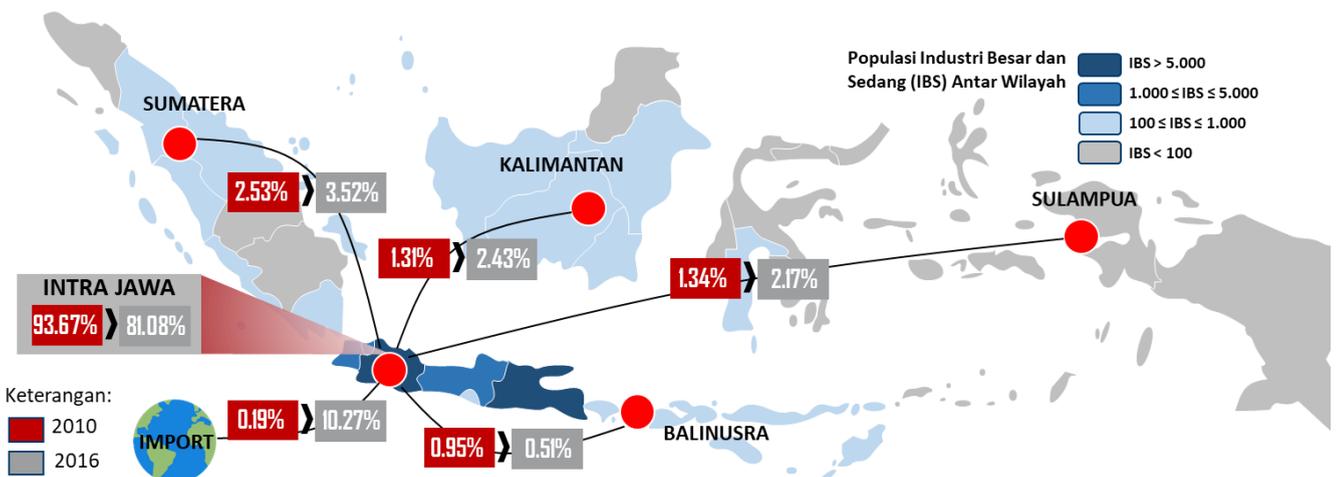
Sementara itu, proses pengolahan limbah smelter juga menjadi kendala kritikal yang perlu diselesaikan. Saat ini, terdapat 3 metode penampungan ataupun pembuangan limbah yang diajukan perusahaan, yakni *Tailing Dam*, *Dry Stacking*; atau *Deep Sea Tailing Placement (DSTP)*. Namun demikian, ketiga opsi tersebut membutuhkan biaya yang

tinggi dan/atau berpotensi mencemari lingkungan. Oleh karenanya diperlukan metodologi pengolahan SDA yang dapat mengurangi produksi limbah B3. Salah satu alternatifnya ialah dengan perluasan penggunaan teknologi Step Temperature Acid Leaching (STAL) yang telah lolos uji validasi oleh ESDM, BPPT, dan perusahaan EPC Internasional.

### Family Makanan dan Minuman

**Ketergantungan akan bahan baku dan barang antara dari impor terpantau meningkat, di tengah penggunaan teknologi untuk pengolahan yang masih minimal.**

Perkembangan *linkage* dari produk impor naik dari 0,19% pada 2010 menjadi 10,27% pada 2016 (Gambar III.6). Kenaikan peran impor disumbang oleh keterbatasan peningkatan produksi hulu domestik, antara lain, produk biji kakao, gula, dan garam industri. Beberapa kendala utama yang dihadapi ialah rendahnya produktivitas sisi hulu dan *mismatch* kualitas dengan kebutuhan industri. Sementara dari sisi *linkage* domestik, terdapat kenaikan peran dari luar Jawa, kecuali wilayah Balinusra. Dari sisi komposisi ekspor, *family* ini merupakan satu-satunya yang masih didominasi oleh kategori *Resource Based Manufactures* (70,3%) dan *Primary Products* (29,7%) pada tahun 2020 dan relatif tidak berubah sejak tahun 2019 (Grafik III.8), hal tersebut didorong oleh tingginya pangsa ekspor CPO dibandingkan dengan ekspor komoditas lainnya.



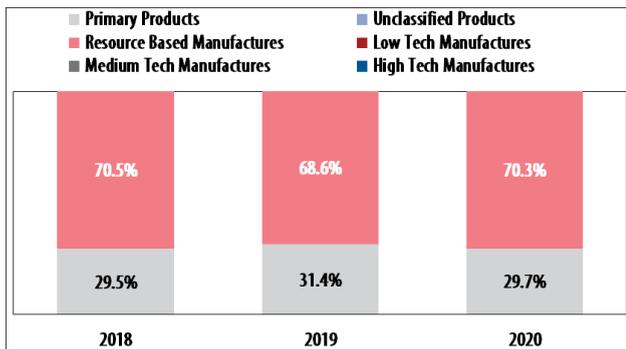
Sumber: Tabel IO/IRIO 2016, diolah

**Gambar III.6.** Pemetaan *Linkage* Antarwilayah Family Mamin

**Prioritasi kendala paling utama masih terdapat di sisi hulu, sedangkan peran *linkage* IKM masih rendah karena keterbatasan permodalan dan kapasitas SDM.** Tantangan utama di sisi hulu disebabkan oleh rendahnya produktivitas yang memengaruhi pasokan bahan baku domestik untuk industri pengolahan lebih lanjut. Salah satu contohnya, ialah rendahnya produktivitas tanaman kelapa sawit dari perkebunan rakyat yang hanya sebesar 3,3 ton/Ha/tahun atau berbeda jauh dengan produktivitas

tanaman kelapa sawit milik perusahaan swasta sebesar 4,09 ton/Ha/tahun dan perkebunan negara yakni 3,95 ton/Ha/tahun. Hal tersebut disebabkan oleh umur tanaman kelapa sawit yang sudah tua dan pemeliharaan yang kurang teratur. Terbatasnya produksi buah kelapa sawit mendorong prakiraan pertumbuhan produksi CPO yang juga relatif rendah di tahun-tahun mendatang sehingga diprakirakan tidak dapat mengimbangi kenaikan permintaan dari domestik maupun eksternal. Oleh karenanya, akselerasi

program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) perlu terus diperkuat, terutama melalui kemudahan proses administrasi di tingkat daerah maupun nasional.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

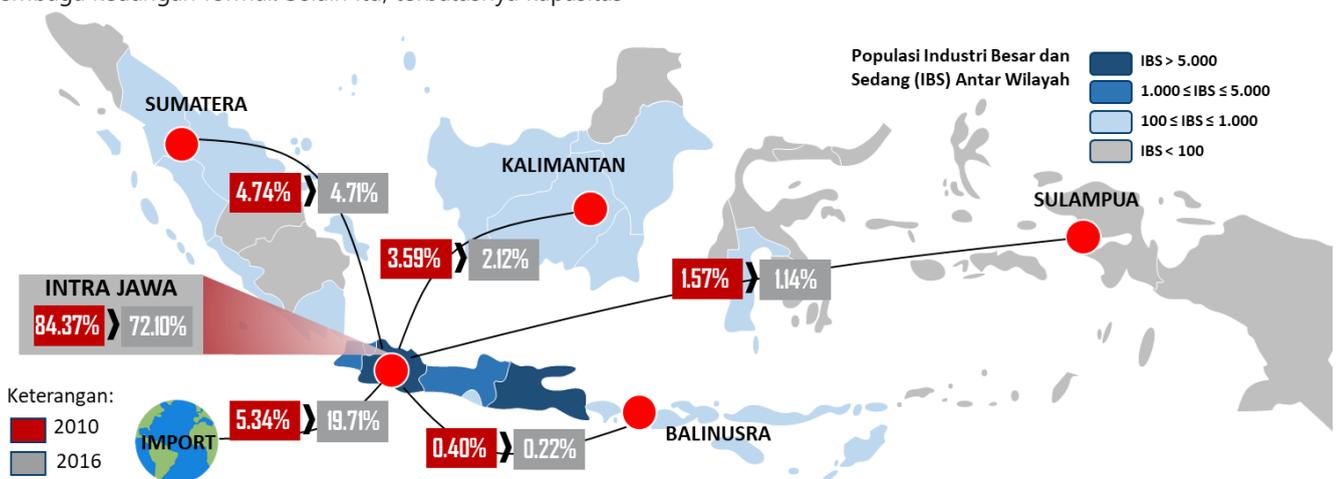
Grafik III.8. Ekspor Family Mamin Berdasarkan Tingkat Teknologi

Kendala lain yang perlu dihadapi ialah masih rendahnya keterkaitan antara IKM dengan industri pengolahan karena kualitas produksi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Secara lebih rinci, penyebab kendala tersebut ialah terbatasnya permodalan IKM untuk mendukung penerapan teknologi pertanian dalam menjaga kualitas produk yang dihasilkan, seiring minimnya pemenuhan pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Selain itu, terbatasnya kapasitas

SDM di sektor pertanian, perkebunan, maupun perikanan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan formal mayoritas tenaga kerjanya. Oleh karenanya, pemerintah perlu melakukan peningkatan fasilitas untuk pembiayaan IKM melalui penyaluran KUR maupun *supply chain financing*, serta pemberian pelatihan berdasarkan prinsip Good Practices yang didukung oleh pemberian subsidi benih, bibit, dan saprodi.

### Family Padat Karya

Peran impor dalam *linkage* industri padat karya semakin kuat, sedangkan penggunaan teknologi masih pada tingkat *low to medium*. Tingkat keterkaitan produk impor pada *family* padat karya tercatat naik cukup tinggi dari 5,34% pada 2010 menjadi 19,71% pada 2016 (Gambar III.7). Kenaikan tingkat ketergantungan tersebut disebabkan oleh relatif terbatasnya pasokan bahan baku dari produsen domestik, terutama untuk industri TPT, alas kaki, dan petrokimia. Sementara, tingkat pengolahan produk untuk *family* ini relatif cukup baik dengan penggunaan teknologi yang didominasi tingkat *Low and Medium Technology Manufactures* sebesar 58,3% (Grafik III.9).



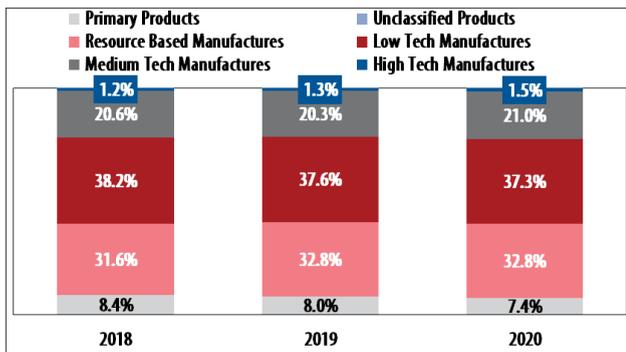
Sumber: Tabel IO/IRIO 2016, diolah

Gambar III.7. Pemetaan *Linkage* Antarwilayah Family Padat Karya

**Tantangan pembiayaan, penguatan peran IKM, serta kendala tata niaga perlu diperhatikan untuk mendorong perbaikan kinerja produksi ke depan.** Rendahnya minat perbankan dalam mendukung pembiayaan industri padat karya, terutama TPT dan Alas Kaki menyebabkan terbatasnya penggunaan teknologi mutakhir dalam mendukung peningkatan produksi maupun perbaikan kualitas produk. Persepsi prospek kinerja industri yang relatif terbatas, menyebabkan belum optimalnya penyaluran pembiayaan dari perbankan domestik ke subsektor tersebut. Untuk itu, diperlukan penguatan dukungan otoritas dalam mendorong penyaluran perbankan ke industri tersebut dengan turut

mengedepankan asesmen terhadap kinerja individual perusahaan.

Sementara itu, peran IKM masih terbatas sejalan dengan sulitnya pemenuhan bahan baku yang murah dan kualitas yang baik. Rendahnya kapasitas SDM juga turut memengaruhi kinerja maupun kualitas produk yang dihasilkan. Terkait hal ini, Kemenperin terus mengoptimalkan program *Indonesia Smart Textile Hub* dan *Material Centre* di beberapa wilayah dalam rangka mendorong peningkatan *local value chain*, terutama pada industri TPT.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

**Grafik III.9.** Ekspor Family Padat Karya Berdasarkan Tingkat Teknologi

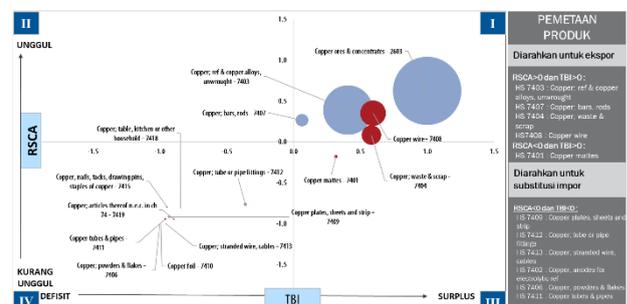
Masih tingginya impor turut menyebabkan kinerja industri domestik tertekan. Di sisi lain, perluasan pasar ekspor perlu terus diperkuat seiring stagnansi pasar ekspor, di tengah banyaknya *trade barriers* untuk aktivitas ekspor ke berbagai negara tujuan. Optimalisasi kebijakan *safeguard* dan pemanfaatan kerja sama yang tersedia, seperti mendorong pemanfaatan IC CEPA dan IA CEPA diharapkan dapat meningkatkan permintaan eksternal sehingga berimplikasi pada perbaikan kinerja industri padat karya yang lebih tinggi.

## Deep Dive Analysis: Potensi Hilirisasi Tembaga

Sebagaimana arahan Presiden RI, kebijakan larangan ekspor bahan mentah dan dukungan percepatan hilirisasinya dapat berpeluang mendorong transformasi ekonomi serta penguatan struktur industri. Presiden Joko Widodo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2021 menegaskan urgensi larangan ekspor bahan mentah, di tengah upaya penguatan hilirisasi SDA, agar komoditas-komoditas tersebut dapat diolah secara terintegrasi untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah tinggi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari reformasi struktural untuk mendukung penguatan struktur industri dan diharapkan mendorong perbaikan transaksi berjalan melalui ekspor yang diarahkan kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Strategi larangan ekspor bahan mentah tersebut telah diimplementasikan sejak tahun 2020, terutama untuk komoditas nikel (Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019). Menindaklanjuti strategi tersebut, pemerintah berencana untuk memperluas penerapan larangan ekspor bahan mentah secara bertahap untuk komoditas bauksit, timah, hingga tembaga.

Komoditas tembaga merupakan produk potensial mempertimbangkan posisi Indonesia yang menjadi produsen terbesar kedelapan dunia (pangsa 3,7%) dan memiliki cadangan terbesar kelima dunia (pangsa 6,1%).

Pemetaan melalui indikator RSCA dan TBI menunjukkan bahwa sebagian dari produk olahan tembaga memiliki daya saing yang cukup baik (kuadran A) (Grafik III.10). Berdasarkan asesmen terkini, nilai tambah fase smelting tembaga masih relatif kecil dengan produk turunannya yang belum dimanfaatkan dengan luas. Di sisi lain, struktur industri tembaga pada bagian *forming* belum tersedia luas di Indonesia, sehingga mendorong perlunya pengembangan industri tembaga ke sisi hilir yang dapat memberikan nilai tambah lebih besar (Gambar III.8). Di masa mendatang, potensi permintaan produk hilirisasi tembaga diproyeksikan akan meningkat, didorong oleh tingginya kebutuhan untuk bahan baku di industri otomotif terutama pengembangan kendaraan listrik, serta tingginya potensi peningkatan penggunaan energi hijau yang ramah lingkungan (Gambar III.9).



Keterangan: ●: Ekspor tumbuh positif di 2020, ●: Ekspor tumbuh negatif di 2020

Sumber: WITS, diolah

**Grafik III.10.** Pemetaan Komoditas Ekspor Tembaga – RSCA & TBI

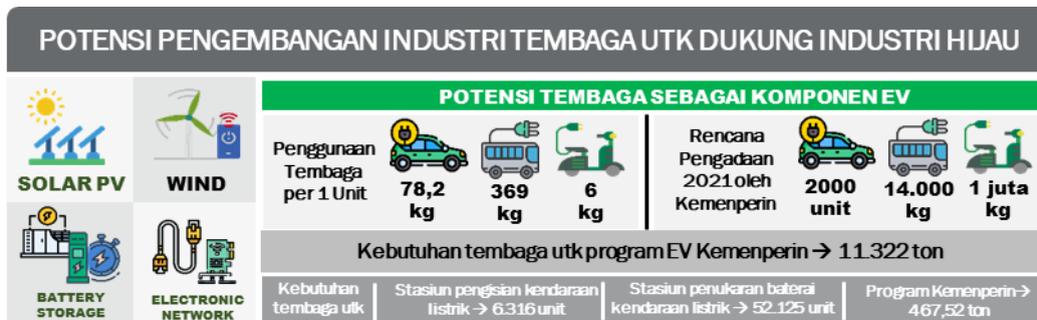
## Berbagai tantangan struktural berisiko menghambat proses peningkatan nilai tambah industri tembaga untuk memberikan trickle down effect bagi masyarakat.

Tren perbaikan harga komoditas yang diprakirakan masih akan berlangsung ke depan perlu dimanfaatkan secara lebih strategis oleh pemerintah dalam rangka mendorong investasi hilirisasi SDA yang meningkatkan nilai tambah produk ekspor, termasuk komoditas tembaga. Berdasarkan *lesson learned* pemulihan industri selama 2021, transmisi jalur investasi bagi industri hilirisasi SDA mampu memberikan *spillover* positif bagi ekonomi daerah melalui peningkatan konsumsi rumah tangga maupun penyerapan tenaga kerja lokal. Namun, perkembangan investasi hilirisasi SDA yang pada saat ini cukup masif tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang berisiko menghambat proses peningkatan nilai tambah produk yang dapat menguatkan *trickle down effect* di daerah. Sejumlah tantangan tersebut dapat dilihat melalui *framework* analisis 3P, yakni Perbaikan Faktor Produksi (P1), Pengaturan dan Kelembagaan (P2), dan Promosi dan Kerjasama Perdagangan (P3).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Gambar III.8. Kapasitas Produksi Industri Tembaga



Sumber: Kemenperin, diolah

Gambar III.9. Potensi Pengembangan Industri Tembaga untuk Mendukung Industri Hijau

**Pada aspek Perbaikan Faktor Produksi (P1), peningkatan nilai tambah industri tembaga hingga tahapan smelting masih terbatas, di tengah ketersediaan industri hilir yang belum banyak tersedia.**

Produksi tembaga terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, produksi tembaga diperkirakan tumbuh tinggi sebesar 44,25% (yoy), terutama disumbang oleh peningkatan produksi tambang di Papua setelah optimalnya proyek *underground mining*. Ke depan, prospek produksi konsentrat tambang diperkirakan akan terus meningkat sampai dengan 4,4 juta ton pada tahun 2025, sejalan dengan masih berlangsungnya eksplorasi tambang di beberapa wilayah. Di sisi lain, pembangunan smelter di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat terus dilakukan dengan target tambahan kapasitas utilitas sebesar 2,9 juta ton pada tahun 2025, sehingga total kapasitas smelter yang tersedia akan mencapai 4,1 juta ton. Oleh karenanya, pemerintah memprakirakan akan terdapat 300 ribu ton konsentrat tembaga yang belum dapat diolah.

Mencermati hal tersebut, percepatan pembangunan smelter di Jawa Timur dan NTB menjadi krusial untuk diselesaikan, agar tidak lebih banyak lagi potensi produksi tembaga yang tidak dapat diolah. *Progress* pembangunan smelter tembaga di Jawa timur per November 2021 baru mencapai 11,1% dan dijadwalkan akan selesai pada tahun 2024. Beberapa kendala di daerah yang perlu diselesaikan ialah percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol dan kepastian pasokan air bersih di Kawasan *Java Integrated Industrial and Port Estate* (JIPE) yang membutuhkan air baku sebanyak 600 liter/detik. Sementara itu, *progress* pembangunan smelter di NTB telah mencapai 27,6% dan dijadwalkan selesai pada

tahun 2023, oleh karenanya diperlukan dukungan dari sisi fiskal maupun nonfiskal untuk mengoptimalkan nilai keekonomian smelter tembaga.

**Pengembangan industri *forming* juga perlu dilakukan secara simultan bersama dengan penguatan kapasitas industri hulu untuk mendorong substitusi impor.**

Produksi katoda tembaga yang saat ini sebesar 325.000 ton per tahun, belum dapat mengimbangi kapasitas industri hilir tembaga Indonesia yang dapat mencapai 550.000 ton. Namun demikian, upaya untuk mendorong peningkatan produksi sisi hulu, dengan target mencapai 1,15 juta ton (naik 253,8% dibandingkan tahun 2021), diperkirakan tidak akan dapat secara optimal diserap oleh industri hilir dalam negeri apabila tidak terdapat penambahan kapasitas industri hilir yang signifikan. Kondisi tersebut menjadi *potential opportunity loss* dari nilai tambah olahan tembaga yang relatif besar. Selain itu, kebutuhan produk hilir industri tembaga juga berpeluang semakin meningkat seiring pengembangan industri otomotif untuk produk kendaraan listrik dan peningkatan penggunaan energi hijau yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan industri hilir, baik dari sisi kapasitas maupun efektivitas LVC hasil olahan tembaga. Pengembangan industri tembaga di bagian *forming* juga perlu didorong dalam rangka mendukung substitusi impor produk katoda tembaga yang hingga kini sebagian masih banyak diimpor.

**Selain faktor produksi, aspek Pengaturan dan Kelembagaan (P2) melalui dukungan insentif pemanfaatan harga gas industri tertentu dan regulasi tarif impor nasional juga diperlukan.** Dalam rangka mendorong kinerja produksi dan meningkatkan daya saing

produk olahan tembaga domestik, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memperluas penerima insentif penurunan harga industri sebesar USD6/MMBTU ke industri pengolahan tembaga sejalan dengan besarnya komponen biaya *input* energi pada industri ini, terutama untuk aktivitas smelter. Selain itu, aspek pengaturan untuk industri hilir tembaga juga memerlukan dukungan kebijakan tarif impor nasional. PMK No.6/PMK.010/2017 mengatur bahwa tarif impor industri hilir memiliki *range* tarif yang lebih besar (0-15%) dibandingkan impor industri hulu (0-5%) (Tabel III.1). Namun demikian, sebesar 83,2% dari pangsa impor produk hilir tembaga pada 2021 dikenakan tarif impor sebesar 0-5%, atau sama dengan tarif impor yang berlaku bagi produk impor di bagian hulu. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tarif impor nasional belum mendukung sepenuhnya pengembangan industri hilir tembaga, sehingga diperlukan adanya harmonisasi tarif impor yang dapat menjadi insentif bagi hilirisasi tembaga dalam negeri.

**Tabel III.1.** Tarif Impor untuk Produk Industri Tembaga

INDUSTRI HULU	INDUSTRI HILIR	INDUSTRI PENGGUNA
HS 7403-7406	HS 7401, 7402 dan HS 741...	HS 8544
<b>TARIFO-5%</b>	<b>TARIFO-15%</b> 2020: 81.4% 2021: 83.2% *pangsa impor yang terkena tarif impor 0-5%	<b>TARIFO-12.5%</b> 2020: 37.7% 2021: 30.9% *pangsa impor yang terkena tarif impor 0-5%
*) dari total impor kelompok komoditas masing-masing industri		
IMPOR (SD. NOV 2021) US\$ 833,4 Juta	IMPOR (SD. NOV 2021) US\$ 595,7 Juta	IMPOR (SD. NOV 2021) US\$ 948,9 Juta

Sumber: Kemenkeu, diolah

**Aspek Promosi dan Kerja Sama Perdagangan (P3) juga perlu mendapatkan perhatian melalui perluasan penerapan disinsentif untuk ekspor sejalan dengan optimalisasi LVC secara *end-to-end*.** Saat ini, katoda tembaga yang diproduksi oleh smelter domestik belum seluruhnya dijual di dalam negeri, di tengah ketergantungan impor untuk komoditas yang sama masih relatif tinggi. Beberapa faktor yang mendorong terciptanya kondisi tersebut, di antaranya adalah (i) kuatnya hubungan afiliasi antara produsen smelting dengan *buyer* ekspor, sehingga menyebabkan hampir seluruh hasil produksi diarahkan untuk ekspor; dan (ii) *mismatch* skema pembayaran *potential buyer* ke smelter, mekanisme transaksi yang tersedia saat ini mensyaratkan pembayaran dilakukan di awal, sehingga industri lebih memilih membeli katoda dari luar negeri dengan fasilitas L/C yang memiliki jangka waktu sampai dengan 4 bulan. Kondisi tersebut memengaruhi utilisasi kapasitas industri hilir yang rendah, sehingga harga produk yang dihasilkan menjadi kurang kompetitif dibandingkan produk turunan impor. *Re-route* hasil produksi PT Smelting dapat memberikan peluang untuk menurunkan ketergantungan impor atas produk olahan tembaga. Selain itu, perlu adanya dukungan kebijakan penerapan disinsentif untuk ekspor melalui peningkatan bea keluar (Permendag No.60 Tahun 2020) untuk mengurangi volume ekspor produk katoda tembaga agar dapat diutamakan pemenuhan kebutuhan domestik terlebih dahulu.

# TIM PENYUSUN

**Penanggung Jawab**

Solikin M. Juhro

**Koordinator Penyusun**

IGP Wira Kusuma

M. Abdul Majid Ikram

**Tim Penulis**

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter

Kantor Perwakilan BI Prov. Sumatera Utara

Kantor Perwakilan BI Prov. Jawa Timur

Kantor Perwakilan BI Prov. Kalimantan Selatan

Kantor Perwakilan BI Prov. Bali

Kantor Perwakilan BI Prov. Sulawesi Selatan







BANK INDONESIA

Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10350 – Indonesia [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)